



# **RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

**DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Makassar, 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mengizinkan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 sehingga dapat tersusun.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, serta memperhatikan isu kehutanan yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagai langkah pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid 19.

Terdapat empat sasaran pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2021 yaitu meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan, meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan, meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumberdaya alam hayati, terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan, sehingga diharapkan rencana kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen penganggaran perubahan (Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan) pada tahun 2021 sehingga sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dapat terwujud

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan, sehingga Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, tersusun dengan baik.

Makassar, 2021

Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Sulawesi Selatan

**Ir. H. ANDI PARENRENGI, M.P**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP.19631231 199703 1020

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Diagram .....	iv
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
1.1   Latar Belakang .....	1
1.2   Landasan Hukum .....	3
1.3   Maksud dan Tujuan .....	4
1.4   Sistematika Penulisan .....	4
BAB II   Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 .....	6
2.1   Evaluasi Renja Dinas Kehutanan Prov. Sulsel tahun 2020 .....	6
2.2   Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	38
2.3   Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah .....	46
2.4   Review terhadap rancangan awal RKPD .....	47
2.5   Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .....	62
BAB III   Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	67
3.1   Telaahan terhadap kebijakan nasional .....	67
3.1.1   Tujuan dan sasaran pembangunan daerah .....	67
3.1.2   Prioritas dan sasaran pembangunan nasional 2022 .....	68
3.2   Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 .....	73
3.2.1   Sasaran pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan .....	77
3.3   Program dan kegiatan .....	78
BAB IV   Rencana Kerja dan Pendanaan .....	93
4.1   Prioritas perangkat daerah yang mendukung prioritas provinsi .....	93
4.2   Prioritas perangkat daerah .....	99
BAB V    Penutup .....	102
5.1   Kaidah-kaidah pelaksanaan .....	102
5.2   Rencana tindak lanjut .....	102

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Target dan realisasi tujuan dan sasaran tahun 2021 .....	7
Tabel 2	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra perangkat daerah Sampai dengan Triwulan I tahun 2021 .....	8
Tabel 3	Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Prov. Sulsel .....	24
Tabel 4	Review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD tahun 2021...	32
Tabel 5	Perubahan Prioritas, Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2021 .....	50
Tabel 6	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021 .....	53
Tabel 7	Keterkaitan RPJMD dan Rencana Strategis .....	54
Tabel 8	Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 dan tahun 2022 .....	77
Tabel 9	Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan .....	62

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Perkembangan perhutanan sosial .....	25
Diagram 2	Kelompok tani hutan .....	26
Diagram 3	Kerusakan kawasan hutan .....	27
Diagram 4	Rehabilitasi Hutan dan Lahan.....	28
Diagram 5	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan.....	29
Diagram 6	Luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan .....	30



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah identik dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat dan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dalam aspek pendapatan kesempatan kerja, akses pengambilan kebijakan. Mewujudkan hal tersebut diperlukan perencanaan yang logis, rasional, komprehensif dan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Perencanaan yang sistematis akan memberi acuan yang jelas dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan strategis tahunan sektor kehutanan pada tahun 2021, yang memuat perubahan kebijakan anggaran daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan pengurangan anggaran program dan kegiatan. Dokumen Rencana Kerja Perubahan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 15 dan disusun melalui koordinasi, sinergitas dengan pemangku kepentingan untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan hutan yang lestari dan berkesinambungan.

Perubahan rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021 sampai dengan semester I, serta dinamika kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam percepatan pemulihan ekonomi dan sosial serta dampak pandemic Covid 19.

Rencana Kerja Perubahan tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ketiga Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023. Beberapa program strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bagian dalam pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, dengan demikian dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2021 sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.



RKPD perubahan tahun 2021 menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021, serta memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada RKPD Pokok Tahun 2021, maupun untuk menampung perubahan belanja prioritas dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021

Oleh karena itu, Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2021 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 92 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
17. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
19. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengesahan Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2021





### 1.3 Maksud dan Tujuan

1. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 disusun dengan maksud untuk sebagai pedoman dan acuan sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam rangka mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Tujuan
  - a. Menetapkan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai melalui APBD Propinsi maupun melalui DAK tahun 2021
  - b. Acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021
  - c. Sebagai tolok ukur penilaian/evaluasi Kinerja Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan

#### Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai Triwulan II

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

#### Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perubahan perangkat daerah, program dan kegiatan

#### Bab IV. Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat



## Bab V. Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Rencana Kerja Perubahan serta kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II**

Evaluasi rencana kerja merupakan bentuk pertimbangan dan arahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang sekaligus penentuan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan sebagai berikut :

#### **2.1 Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II**

Sesuai dengan rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan yang akan dicapai meliputi :

- 1. Tujuan 1 : Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya hutan
  - Sasaran 1.1 : Meningkatnya pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu
  - Sasaran 1.2 : Meningkatnya akses masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial
- 2. Tujuan 2 : Meningkatkan daya dukung dan daya tampung hutan dan lahan
  - Sasaran 2.1 : Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan
  - Sasaran 2.2 : Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan

Target dan realisasi tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sesuai rencana kerja tahun 2021, tersaji pada tabel berikut :



**Tabel 1**  
**Target dan realisasi tujuan dan sasaran tahun 2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target tahun 2021	Realisasi Triwulan II
1. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan		Persentase kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan	0,06	0,06
	1.1 Meningkatkan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu	Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	12.000 ha	26.151,58 ha
	1.2 Meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial	Persentase wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	3,51 %	9,05 %
2. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung hutan dan lahan		Indeks kualitas tutupan lahan	58,62	58,62
	2.1 Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap total lahan kritis Prov. Sulsel	7,93 %	7,57 %
	2.2 Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan	Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	64,67 %	68,20
		Persentase kerusakan kawasan hutan	1,38 %	0,70 %
		Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	16 KPH	16 KPH

Capaian Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2021 di laksanakan 9 (Sembilan) program dan 76 (tujuh puluh enam) kegiatan, dengan uraian sebagaimana pada tabel berikut ;



**Tabel 2**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pilihan									
	Bidang Kehutanan									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi</b>	<b>65,47 %</b>					<b>57,91 %</b>	-	
		<b>Persentase kerusakan hutan</b>	<b>14,82 %</b>					<b>17,59 %</b>	-	
		<b>Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan</b>	<b>92.336,62 m<sup>3</sup></b>					<b>92.336,62 m<sup>3</sup></b>	24.024,99	
		<b>Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu</b>	<b>283 ton</b>					<b>283 ton</b>	-	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Kewenangan Provinsi</b>	<b>Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya</b>	<b>1.780.029 ha</b>					<b>1.780.029 ha</b>	1.780.029	
	Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah KPH	Jumlah dokumen rancang bangun KPH	11 dokumen					3 dokumen		
	Pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH	Jumlah patok batas blok dan petak	748 buah					3183 buah		
		Panjang penataan batas blok dan petak	150 km					633 km		
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah jenis sarana prasarana operasionalisasi KPH	3 jenis					3 jenis		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Luas Wilayah yang diusulkan untuk perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	500 ha					500 ha		
	<b>Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencanan Pengelolaan KPH</b>	<b>24 dokumen</b>					<b>24 dokumen</b>	0	



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP KPH	15 dokumen					15 dokumen		
		Jumlah dokumen RPHJPD	9 dokumen					9 dokumen		
	<b>Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	<b>Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan</b>	<b>Rp. 25.000.000</b>					<b>Rp. 25.000.000</b>	116.363,84	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan produksi	110.425,79 ha					110.425,79 ha		
		Jumlah izin wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan produksi	60 izin					60 izin	91 izin	
		Jumlah produksi HHBK di kawasan hutan produksi	3.041,94 ton					3.041,94 ton	759.66 ton	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Lokasi 'Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan lindung	16 lokasi					16 lokasi		
		Jumlah Lokasi wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan lindung	16 lokasi					16 lokasi		
		Jumlah Lokasi produksi HHBK di kawasan hutan lindung	16 lokasi					16 lokasi	89 lokasi	
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi					12 lokasi		
	<b>Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara</b>	<b>Luas rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara</b>	<b>1.571 ha</b>					<b>1.571 ha</b>		
	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah lokasi sumber benih unggul yang dikembangkan	5 lokasi					5 lokasi		
		Jumlah unit persemaian	11 lokasi					3 lokasi		
	Pembangunan Hutan Rakyat diluar Kawasan Hutan Negara	Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	233 ha					233 ha		
		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	233 ha					233 ha		



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Yang Disusun.	1 dokumen					1 dokumen		
	Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan.	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan atau pengawasan rehabilitasi lahan	30 kali					30 kali		
		Jumlah pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis	15 kali					15 kali		
	Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara	Luas lahan penghijauan lingkungan diluar kawasan hutan negara	10 ha					10 ha		
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>Persentase Jumlah Kasus Kerusakan Kawasan hutan yang tertangani</b>	<b>100 %</b>					<b>100 %</b>	50 %	
	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	1280 orang					424 orang		
		Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	30 orang					30 orang		
	Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	768 kali patroli (48 kali/KPH)					768 kali patroli (48 kali/KPH)		
		Jumlah papan bicara pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	5 unit/KPH					5 unit/KPH		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring perlindungan hutan	288 kali					288 kali	55 kali	
		Jumlah lokasi pelaksanaan operasi gabungan penanganan tindak pidana khusus kehutanan	1 lokasi					1 lokasi	1 lokasi	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	12 kali					12 kali		



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah laporan titik api (hot spot) yang dipantau dan dikendalikan	16 laporan					16 laporan		
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>	<b>Jenis HHBK yang diolah oleh pemegang izin</b>	<b>3 jenis</b>					<b>3 jenis</b>		
	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Produksi HHBK yang diolah oleh pemegang izin	49.187,134 ton					49.187,134 ton		
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah komitmen izin fasilitasi penerbitan IUIPHHBK	5 izin					5 izin		
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas areal budidaya HHBK	100 ha					100 ha		
	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah pemegang IUIPHHBK yang diawasi	5 izin					5 izin		
	<b>Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi &lt;6.000 M3 per tahun</b>	<b>Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan kayu</b>	<b>28.155,1717 ton</b>					<b>28.155,1717 ton</b>	422,99	
	Rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/tahun	Jumlah industri yang aktif dan tertib aturan	60 industri					60 industri		
		Jumlah data produksi kayu olahan	3 laporan					3 laporan		
		Jumlah data asal usul rencana pemenuhan bahan baku	16 laporan					16 laporan		
	Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun	Jumlah data sebaran GANIS PHPL yang melaksanakan PUHH pada industry	40 orang					40 orang		
		Jumlah data pemasaran hasil hutan kayu lndus dan ekspor	24 laporan					24 laporan		





# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah 12ndustry yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi	60 industri					60 industri		
	<b>Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan</b>	<b>Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit tanaman hutan</b>	<b>95 pemohon</b>					<b>95 pemohon</b>	13 pemohon	
	Penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/ atau bibit terdaftar	Jumlah pemohon pengada benih dan pengedar benih/bibit tanaman hutan terdaftar	36 pemohon					36 pemohon		
		Jumlah calon sumber benih yang diidentifikasi	15 lokasi					15 lokasi		
	Sertifikasi sumber benih	Jumlah pemohon sertifikasi sumber benih	30 pemohon					30 pemohon		
	Sertifikasi mutu benih	Jumlah pemohon sertifikasi mutu benih	15 pemohon					15 pemohon	12 pemohon	
	Sertifikasi mutu bibit	Jumlah pemohon sertifikasi mutu bibit	50 pemohon					50 pemohon	1 pemohon	
	Pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit	Jumlah lokasi pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit tanaman hutan	24 kab/kota					24 kab/kota	8 kab/kota	
	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata</b>	<b>6 jenis</b>					<b>2 jenis</b>	0 jenis	0,00
	<b>Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi</b>	<b>100 penangkar</b>					<b>100 penangkar</b>		
	Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Jumlah peserta sosialisasi tata cara perizinan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	200 orang					200 orang		



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah laporan monitoring pengendalian dan pengawasan penangkaran tumbuhan satwa liar yang tidak dilindungi	1 laporan					1 laporan		
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan</b>	<b>16,55 %</b>					<b>15,65 %</b>	-	
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	<b>Jumlah SDM bidang kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>60 sdm</b>					<b>60 sdm</b>	162	
		<b>Jumlah masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya</b>	<b>1.000 orang (50 KTH)</b>					<b>1.000 orang (50 KTH)</b>	350	
		<b>Jumlah usaha perhutanan sosial yang ditingkatkan</b>	<b>50 KTH</b>					<b>50 KTH</b>	15	
		<b>Jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan</b>	<b>350 KTH</b>					<b>350 KTH</b>	50	
	Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	100 orang					100 orang	162 orang	
		Jumlah SDM Kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	200 orang					200 orang	152 orang	
		Jumlah unit penyelenggara penyuluhan yang dimonitoring dan dievaluasi	16 unit penyelenggara					16 unit penyelenggara	16 unit penyelenggara	
	Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan	Jumlah KTH yang naik kelas kemampuan	2 KTH					2 KTH	16 KTH	
		Jumlah kelompok tani/orang yang mengikuti lomba wana lestari dan kalpataru	7 klp/orang					7 klp/orang	4 orang	



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah pembentukan dan pengembangan wana wiyata widyakarya	1 kelompok					1 kelompok		
	Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	Jumlah peserta sosialisasi/ Rapat Koordinasi perhutanan sosial	100 orang					100 orang	150 orang	
		Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	84 kelompok tani/KTH					84 kelompok tani/KTH	43 kelompok	
		Jumlah kelompok perhutanan sosial yang dimonitoring dan dievaluasi	82 kelompok					82 kelompok		
		Jumlah peserta temu usaha KUPS	100 orang					100 orang		
		Jumlah laporan konflik tenurial PS yang difasilitasi penyelesaiannya	2 laporan					2 laporan		
		Jumlah produk KUPS yang dipromosikan	10 produk					10 produk	14 produk	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	<b>Jumlah DAS yang direhabilitasi</b>	<b>2 DAS</b>					<b>2 DAS</b>	-	
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah DAS yang dikelola di Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>2 DAS</b>					<b>2 DAS</b>		
	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	2 dokumen					2 dokumen		
	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Jumlah DAS yang dioptimalisasikan fungsi dan daya dukungnya	2 DAS					2 DAS		
	Penerapan teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS	Jumlah unit dam penahan	34 unit					34 unit		
		Jumlah unit gully plug	22 unit					22 unit		
		Jumlah unit sumur resapan	80 unit					80 unit		
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah masyarakat dan pihak terkait yang hadir dan berpartisipasi pada kegiatan penanaman	250 orang					250 orang		



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengembangan Kelembagaan pengelolaan DAS	Jumlah pertemuan rapat yang dilaksanakan	4 kali					4 kali		
	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	1 tahun					1 tahun		
		Jumlah pertemuan atau rapat yang dilaksanakan	4 kali					4 kali		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>					<b>100 %</b>	69,44	
		<b>Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik</b>	<b>100 %</b>					<b>100 %</b>	94,67	
		<b>Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)</b>	<b>100 %</b>					<b>100 %</b>	-	
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100 %</b>					<b>100 %</b>	50 %	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen					1 dokumen	2 dokumen	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen					1 dokumen		
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen					1 dokumen		
	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen					1 dokumen		
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	
		Jumlah laporan data dan informasi yang dikumpulkan dan dipublikasikan	2 laporan					2 laporan		



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu</b>	<b>100 %</b>					<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji, tunjangan dan TPP	843 orang					843 orang	800	
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah aparat SKPD yang dikelola administrasi kepegawaianya	843 orang					843 orang		
		Jumlah administrasi yang disusun	1 laporan					1 laporan		
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	50 dokumen					50 dokumen		
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah pelaporan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 laporan					2 laporan		
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan					1 laporan		
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	1 laporan					1 laporan		
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Jumlah pelaporan keuangan yang tersusun	18 laporan					18 laporan	6 laporan	
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis yang tersusun	2 laporan					2 laporan		
	Kegiatan Administarsi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen laporan barang milik daerah	2 dokumen					2 dokumen	0	
	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan penilaian barang milik daerah SKPD	1 dokumen					1 dokumen		
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penyusunan barang milik daerah SKPD	1 dokumen					1 dokumen		
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	1 dokumen					1 dokumen		



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)</b>	<b>Rp. 1.712.430.000</b>					<b>Rp. 1.712.430.000</b>	<b>0</b>	
	Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan retribusi daerah	1 laporan					1 laporan		
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kebijakan retribusi daerah yang disebarluaskan	1 laporan					1 laporan		
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan objek retribusi daerah	1 laporan					1 laporan		
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan data retribusi daerah	1 laporan					1 laporan		
	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	1 laporan					1 laporan		
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN</b>	90					90	85 %	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	809 orang					809 orang		
		Jumlah pakaian lapangan yang diadakan	319 orang					319 orang		
		Jumlah pakaian korpri yang diadakan	809 orang					809 orang		
		Jumlah pakaian batik khas daerah yang diadakan	809 orang					809 orang		
		Jumlah pakaian olahraga dan perlengkapannya yang diadakan	809 orang					809 orang		
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diadakan	1 laporan					1 laporan		
	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian	1 laporan					1 laporan		
	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah laporan hasil evaluasi penilaian kinerja pegawai	1 laporan					1 laporan	1 laporan	



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparat SKPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 orang					100 orang		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan Perundang-undangan	100 orang					100 orang		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %					100 %	50 %	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	26 unit					26 unit		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	300 unit					300 unit		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	10 jenis					10 jenis		
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah logistik yang tersedia	2 jenis					2 jenis		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis					10 jenis		
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 tahun					1 tahun		
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	1 tahun					1 tahun		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis SKPD yang tertata	50 arsip					50 arsip		
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang tersedia	3 sistem					3 sistem		
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>					<b>100 %</b>	<b>0</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	1 unit					1 unit		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan operasional dinas	1 unit					1 unit		



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan mebel	Jumlah lemari arsip yang tersedia	60 unit					60 unit		
		Jumlah meja kerja pejabat eselon/staf yang tersedia	100 unit					100 unit		
		Jumlah kursi kerja pejabat eselon/staf yang tersedia	100 unit					100 unit		
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	1 unit					1 unit		
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	8 unit					8 unit		
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	8 unit					8 unit		
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>					<b>100 %</b>	<b>39.88 %</b>	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	1 tahun					1 tahun		
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	1 tahun					1 tahun		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 tahun					1 tahun		
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga non PNS	369 orang					369 orang		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %					100 %	17.23 %	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	1 unit					1 unit		
		Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	1 unit					1 unit		





# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan roda 4	1 unit					1 unit		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	43 unit					43 unit		
		Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	43 unit					43 unit		
		Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4	39 unit					39 unit		
		Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 2	382 unit					382 unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	10 unit					10 unit		
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang di pelihara	5 unit					5 unit		
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25 unit					25 unit		
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 tahun					1 tahun		
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 tahun					1 tahun		



Berdasarkan tabel 2 di atas menggambarkan bahwa capaian kinerja program dan kegiatan triwulan II tahun 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Hutan

Program ini merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat kegiatan

- a. Pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung
- b. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan
- c. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi
- d. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6.000 m<sup>3</sup>/tahun
- e. Perbenihan tanaman hutan

Indikator program pengelolaan hutan dan capaiannya sebagai berikut :

- Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi.

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis dilaksanakan di luar kawasan hutan sesuai dengan kewenangan provinsi yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014. Cakupan rehabilitasi hutan dan lahan meliputi penanaman hutan rakyat dan pembangunan bangunan sipil teknis. rehabilitasi hutan dan lahan sampai dengan triwulan II belum dilaksanakan dikarenakan kegiatan penanaman hutan rakyat berkaitan dengan musim penghujan

- Persentase kerusakan hutan.

Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan dilakukan patrol perlindungan hutan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan hutan yang dilaksanakan oleh petugas polisi kehutanan secara rutin tiap bulan di masing-masing wilayah kerja KPH.

- Produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Produksi hasil hutan kayu olahan mencapai 24.024 m<sup>3</sup>.

2. Program Konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya

Program ini mencakup kegiatan :

- a. Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan atau tidak masuk dalam lampiran CITES



Indikator program ini adalah jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata.

Pelaksanaan kegiatan ini dengan melakukan sosialisasi

3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan

Program ini memuat kegiatan

- a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan

Indikator program ini adalah persentase jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan

4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Program ini memuat kegiatan :

- a. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Indikator program ini adalah Jumlah DAS yang direhabilitasi

Capaian indikator ini

Pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2021 memberi kontribusi terhadap pembangunan daerah Sulawesi Selatan diantaranya :

1. Kontribusi ekonomi terhadap PDRB Sulawesi Selatan.

Kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan tergabung pada PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pertumbuhan PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha Sulawesi Selatan pada triwulan II tahun 2021 memberi kontribusi sebesar 23,89 %.

Kontribusi kehutanan tersebut berasal dari produksi hasil hutan kayu olahan dan produksi hasil hutan bukan kayu, dan belum menghitung nilai pemanfaatan jasa lingkungan/ekowisata.

2. Rehabilitasi hutan dan lahan



Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya perbaikan daya dukung lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Rehabilitasi hutan dan lahan memberi kontribusi terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Salah satu unsur IKLH adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang menjadi sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai IKTL provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 54,94 dan tahun 2019 sebesar 58,06.

### 3. Kerusakan kawasan hutan

Pengendalian kerusakan kawasan hutan dan lahan adalah upaya perlindungan daya tampung lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Perlindungan kawasan hutan dari kerusakan yang disebabkan kebakaran hutan, perambahan hutan, illegal logging.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun indikator kinerja kunci outcome Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial
2. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)
3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi



**Tabel 3**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (triwulan II) (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		%	-	14,90	15,65	16,25	19,75	19,75	15,65	16,25	
2	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)		%		1,38	17,59	16,20	0,70	0,70	17,59	16,20	
3	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi		%		55,00	57,91	61,60	35,39	35,39	57,91	61,60	
4	Kontribusi kehutanan terhadap PDRB		%	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	
5	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan		%	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	



Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) outcome sesuai table diatas diuraikan sebagai berikut :

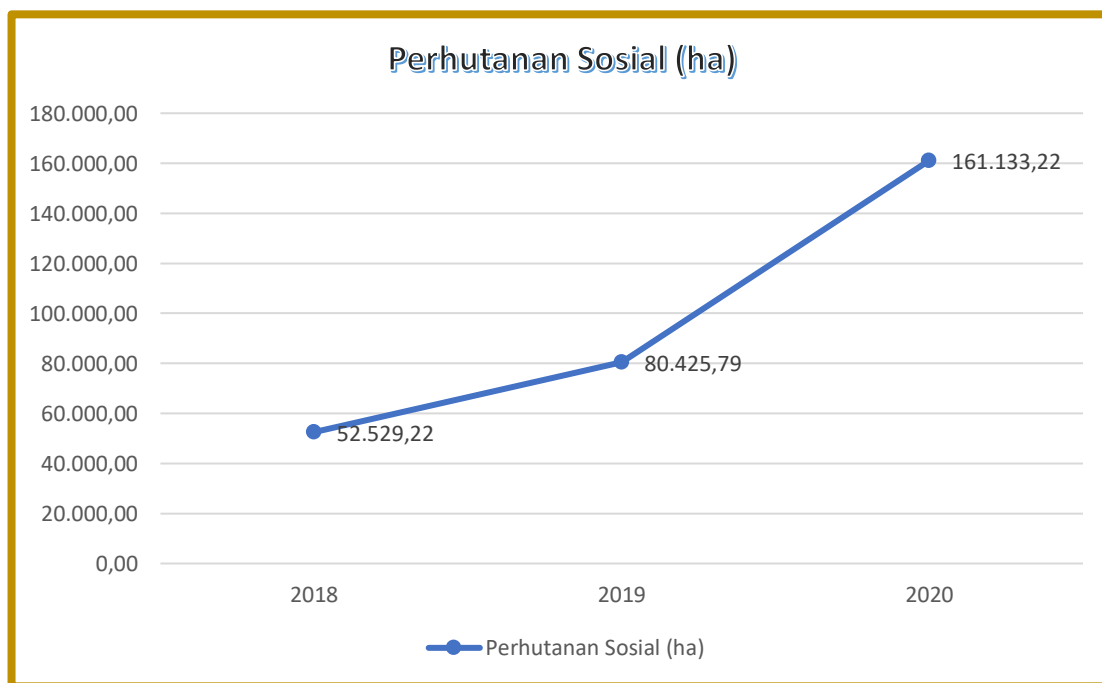
1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial

Perhutanan sosial menjadi suatu solusi dan tantangan pembangunan sektor kehutanan. Keadaan ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan stakeholder lainnya. Perhutanan sosial menjadi solusi karena masyarakat dan lembaga desa diberi akses legal pengelolaan hutan dalam jangka waktu tertentu. Dengan akses legal tersebut masyarakat dapat mengelola kawasan hutan dengan mempertimbangkan potensi hutan tersebut, dengan harapan mampu mendorong perekonomian mikro bagi masyarakat.

Pencapaian pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial sampai dengan tahun 2020 mencapai 161.133,22 ha atau 9,05 % dari luas hutan lindung dan hutan produksi seluas 1.780.029 ha.

Perkembangan perhutanan sosial dapat dilihat pada diagram berikut :

**Diagram 1**  
**Perkembangan perhutanan sosial**





Akses legal pengelolaan hutan dilaksanakan dalam bentuk skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan Kulin KK, yang dikelola oleh kelompok tani hutan berjumlah 400 kelompok tani atau 19,75 % dari total usulan KTH yang terintegrasi.

**Diagram 2**  
**Kelompok Tani Hutan Tahun 2020**



Perkembangan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini memberi gambaran bahwa animo masyarakat untuk mengelola hutan semakin besar yang tentunya diperlukan pembinaan dan pengendalian, serta peningkatan usaha masyarakat sehingga dapat memberi dampak peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui perhutanan sosial menjadi salah satu solusi penyelesaian sengketa tenurial lahan hutan yang selama ini menjadi persoalan pembangunan kehutanan.

2. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi).

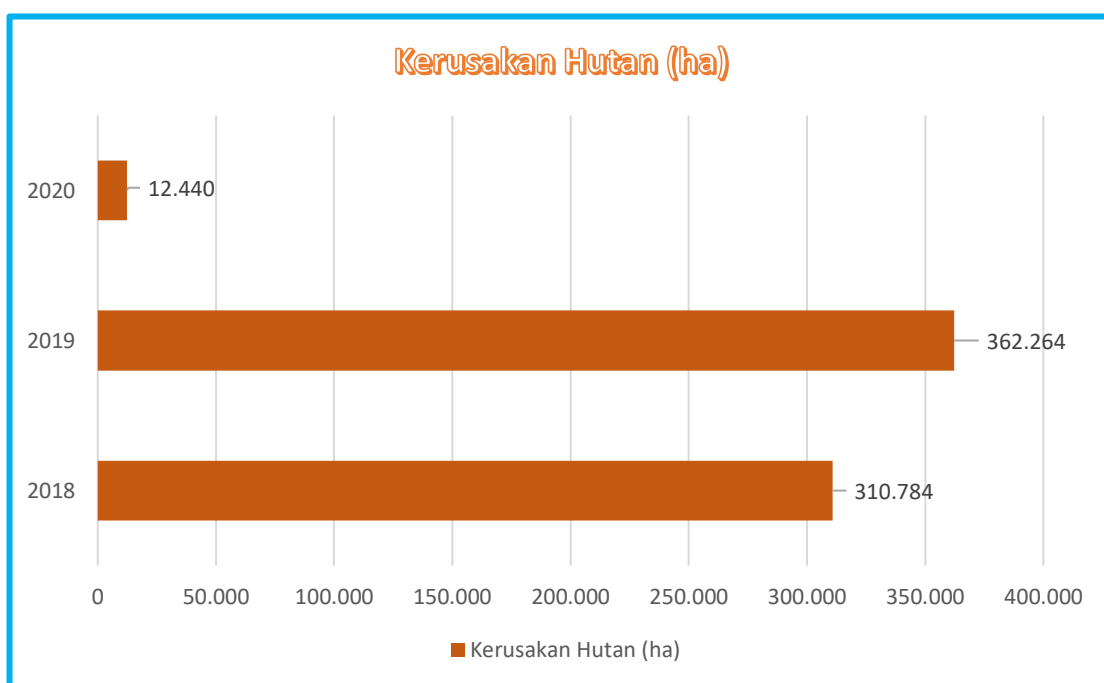
Kerusakan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi tantangan pembangunan kehutanan. Aktivitas masyarakat sekitar hutan menjadi potensi terjadinya kerusakan hutan, sebagian besar masyarakat



memanfaatkan hutan sebagai lahan budidaya tanaman semusim yang memiliki masa panen singkat. Upaya perlindungan dan pengamanan hutan dari kerusakan hutan terus dilakukan dengan pendekatan persuasif sehingga diharapkan adanya kesadaran untuk menjaga ekosistem hutan yang ada.

Kejadian kerusakan hutan disebabkan pengolahan hutan tanpa izin (perambahan hutan), kebakaran hutan dan illegal logging. Perkembangan kerusakan hutan disajikan pada diagram berikut :

**Diagram 3**  
**Kerusakan Kawasan Hutan**



Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa, kerusakan hutan mengalami penurunan menjadi 12.440 ha. Penurunan ini disebabkan karena tahun 2019 luas lahan kritis masih menjadi bagian penghitungan kerusakan hutan, yang semestinya menjadi bagian penghitungan luas lahan kritis yang direhabilitasi.

3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi

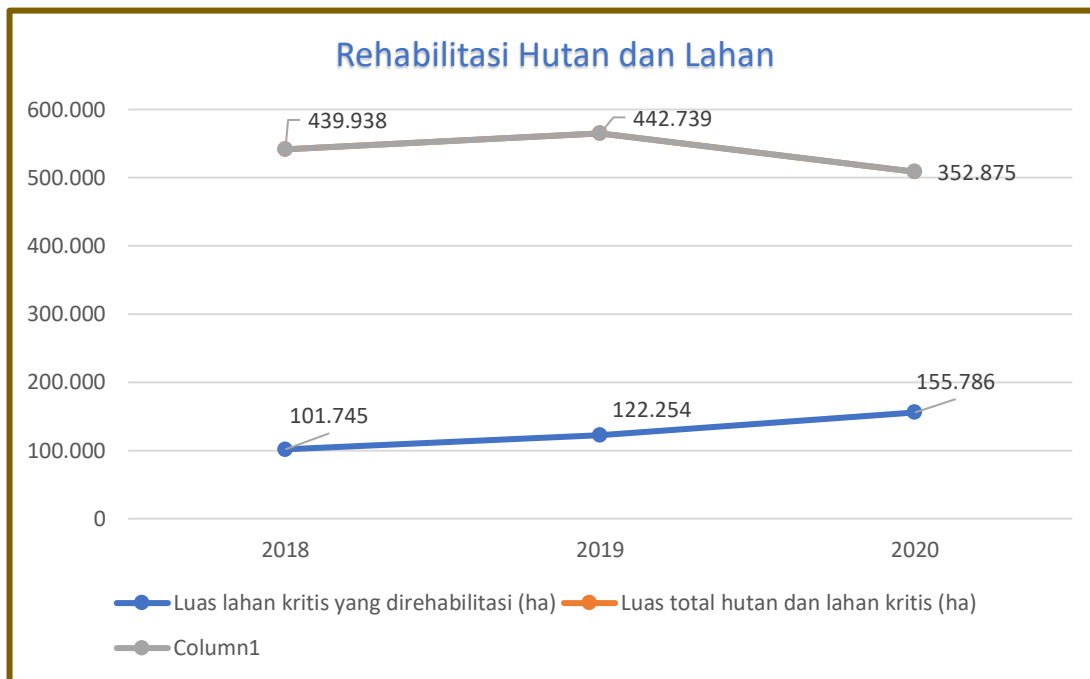
Lahan kritis menjadi prioritas pembangunan kehutanan, dengann luas lahan kritis mencapai 352.874,59 ha pada tahun 2020. Salah satu strategi penanganan lahan kritis melalui pelibatan semua stakeholder untuk





melakukan penanaman. Perkembangan rehabilitasi hutan dan lahan disajikan sebagai berikut :

**Diagram 4**  
**Rehabilitasi Hutan dan Lahan**



#### 4. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Hutan memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, tetapi hanya sebagian kecil dari sumber daya hutan yang berkontribusi secara riil terhadap penerimaan negara dan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari pencapaian Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ketahun mengalami penurunan, dimana capaian pada tahun 2018 sebesar 0,06 persen dan tahun 2019 tetap 0,06 persen. Secara persentase menunjukkan kecilnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan, namun secara nilai terus mengalami penambahan dari tahun ke tahun.

Kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan berdasarkan lapangan usaha memberi kontribusi sebesar 0,06 % pada tahun 2018 dengan nilai PDRB sebesar 289.321,7 milyar dan pada tahun 2019 sebesar 0,06 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 306.553,3 milyar. Kontribusi kehutanan



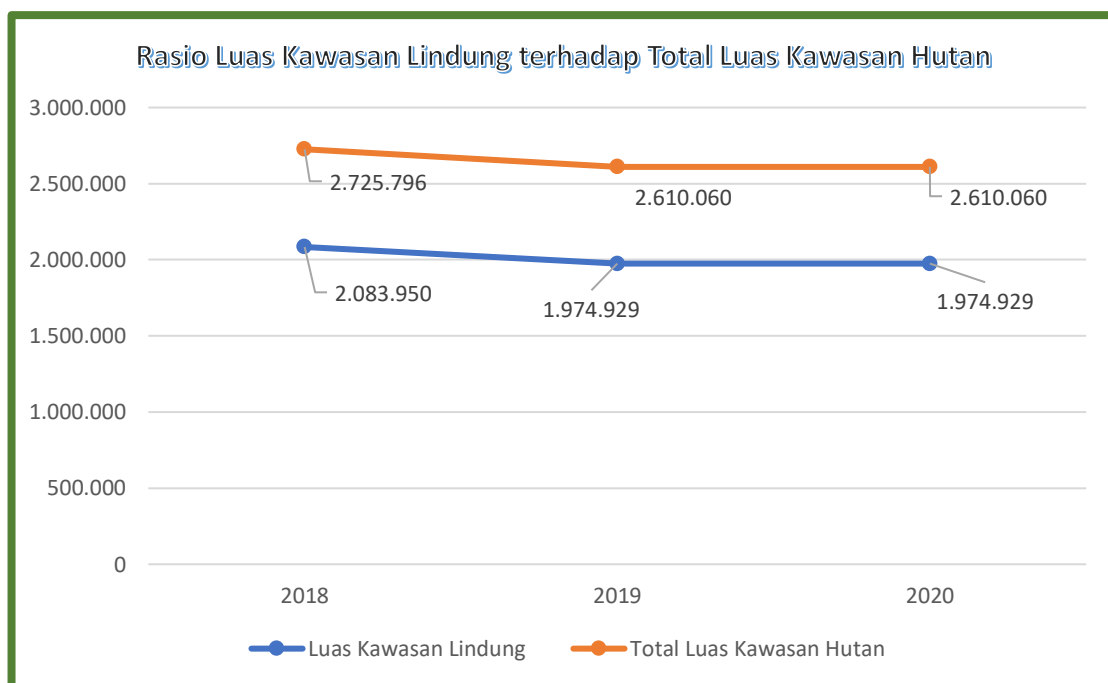
tersebut berasal dari produksi hasil hutan kayu olahan dan produksi hasil hutan bukan kayu, dan belum menghitung nilai pemanfaatan jasa lingkungan/ekowisata.

5. Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan

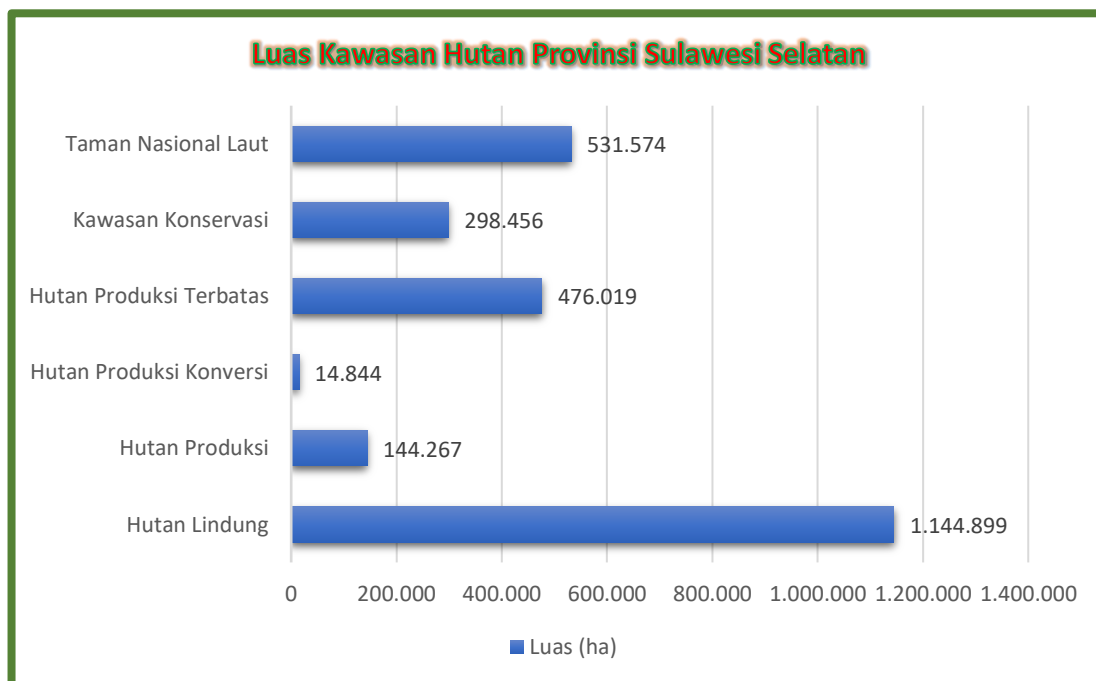
Bila melihat rasio luas kawasan lindung terhadap total Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2015 sampai tahun 2019, menunjukkan bahwa rasio luas kawasan lindung terhadap luas kawasan hutan di Sulawesi Selatan pada periode sebelumnya (2015-2018) sebesar 76,45 persen menurun menjadi 75,66 persen pada tahun 2020.

**Diagram 5**

**Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Total Luas Kawasan Hutan**



Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan tahun 2020 mencapai 75,66 %, merupakan luas rasio luas kawasan hutan lindung dan Kawasan pelestarian alam (hutan suaka alam, cagar alam) terhadap luas Kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 362/MenLHK/setjen/PLA.0/5/2019 bahwa luas kawasan hutan di provinsi Sulawesi Selatan seluas 2.610.060 ha, tersaji pada diagram berikut :

**Diagram 6****Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan****2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah**

Isu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain :

1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung diperuntukkan untuk hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan akan memberi dampak pada ekonomi daerah namun harus tetap memperhatikan asas kelestarian dan keberlanjutan. Potensi kawasan hutan cukup beragam mulai pengembangan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan/ekowisata, namun belum dimanfaatkan secara optimal karena membutuhkan dukungan berbagai pihak.

2. Adanya kerusakan wilayah DAS

Di provinsi Sulawesi Selatan terdapat DAS lintas provinsi, DAS lintas kabupaten, dan DAS dalam Kabupaten. Kondisinya terdapat DAS yang perlu



dipertahankan dan DAS yang perlu dipulihkan. Salah satu DAS lintas provinsi yang memerlukan pemulihan yaitu DAS Saddang dan salah satu DAS lintas kabupaten yang perlu dipulihkan yaitu DAS Jeneberang seluas 78.883,90 ha.

3. Masih adanya kasus illegal logging
4. Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan hutan  
Salah satu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan yaitu melalui perhutanan sosial dengan skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kulin KK. Keikutsertaan masyarakat masih relatif rendah.

Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6394/MENLHK-PKTL/REN/PLA.O/7/2019 Tanggal 23 juli 2019 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi IV, dengan target seluas 242.613 Ha, maka persentase capaian luasan perhutanan sosial sebesar 33,14 % dari target yang ditetapkan.

Permasalahan yang masih menjadi tantangan di sektor kehutanan antara lain :

1. Belum optimalnya upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Masih terdapatnya konflik kepemilikan dan pemanfaatan kawasan hutan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan;
3. Masih terdapatnya lahan kritis dan belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;
4. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan belum optimal, utamanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Perubahan 2021

Berdasarkan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 dengan memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah. maka kebutuhan rencana kerja perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 4**

**Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Rancangan Akhir RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>		Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi	65,47 %	Rp. 7.395.548.249	Program Pengelolaan Hutan		Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi	61,60 %	Rp. 7.395.548.249	
			Persentase kerusakan hutan	14,82 %				Persentase kerusakan hutan	16,20 %		
			Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	92.336,62 m <sup>3</sup>				Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	92.336,62 m <sup>3</sup>		
			Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	283 ton				Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	283 ton		
1	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Provinsi		Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	1.780.029 ha	Rp. 0	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Provinsi		Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	1.780.029 ha	Rp. 0	
a	Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah KPH		Jumlah dokumen rancang bangun KPH	11 dokumen	Rp. 0	Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah KPH	Makassar	Jumlah dokumen rancang bangun KPH	4 dokumen	Rp. 0	
b	Pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH		Jumlah patok batas blok dan petak	748 buah	Rp. 0	Pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH	Sulsel	Jumlah patok batas blok dan petak	748 buah	Rp. 0	
			Panjang penataan batas blok dan petak	150 km			Sulsel	Panjang penataan batas blok dan petak	150 km		
c	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		Jumlah jenis sarana prasarana operasionalisasi KPH	3 jenis	Rp. 0	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Sulsel	Jumlah jenis sarana prasarana operasionalisasi KPH	3 jenis	Rp. 0	
d	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan		Luas Wilayah yang diusulkan untuk perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	500 ha	Rp. 0	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Sulsel	Luas Wilayah yang diusulkan untuk perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	500 ha	Rp. 0	
2	Kegiatan Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen Rencanan Pengelolaan KPH	24 dokumen	Rp. 0	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen Rencanan Pengelolaan KPH	24 dokumen	Rp. 0	
a	Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah dokumen RPHJP KPH	15 dokumen	Rp. 0	Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Makassar	Jumlah dokumen RPHJP KPH	7 dokumen	Rp. 0	
			Jumlah dokumen RPHJPD	9 dokumen			Makassar	Jumlah dokumen RPHJPD	16 dokumen		



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

No	Rancangan Akhir RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	<b>Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>		<b>Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan</b>	<b>Rp. 25.000.000</b>	<b>Rp. 75.120.000</b>	<b>Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>		<b>Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan</b>	<b>Rp. 25.000.000</b>	<b>Rp. 75.120.000</b>	
a	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi		Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan produksi	110.425,79 ha	Rp. 75.120.000	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Sulsel	Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan produksi	110.425,79 ha	Rp. 75.120.000	
			Jumlah izin wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan produksi	60 izin			Sulsel	Jumlah izin wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan produksi	60 izin		
			Jumlah produksi HHBK di kawasan hutan produksi	3.041,94 ton			Sulsel	Jumlah produksi HHBK di kawasan hutan produksi	3.041,94 ton		
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung		Jumlah Lokasi 'Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan lindung	16 lokasi	Rp. 0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Sulsel	Jumlah Lokasi 'Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan lindung	16 lokasi	Rp. 0	
			Jumlah Lokasi wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan lindung	16 lokasi			Sulsel	Jumlah Lokasi wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan lindung	16 lokasi		
			Jumlah Lokasi produksi HHBK di kawasan hutan lindung	16 lokasi			Sulsel	Jumlah Lokasi produksi HHBK di kawasan hutan lindung	16 lokasi		
c	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan/atau Jasa Lingkungan		Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	Rp. 0	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan/atau Jasa Lingkungan	Sulsel	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	Rp. 0	
4	<b>Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara</b>		<b>Luas rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara</b>	<b>1.571 ha</b>	<b>Rp. 3.523.422.249</b>	<b>Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara</b>		<b>Luas rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara</b>	<b>1.571 ha</b>	<b>Rp. 3.523.422.249</b>	
a	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan		Jumlah lokasi sumber benih unggul yang dikembangkan	5 lokasi	Rp. 0	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Sulsel	Jumlah lokasi sumber benih unggul yang dikembangkan	5 lokasi	Rp. 0	
			Jumlah unit persemaian	11 lokasi	Rp. 0		Sulsel	Jumlah unit persemaian	4 lokasi	Rp. 0	
b	Pembangunan Hutan Rakyat diluar Kawasan Hutan Negara		Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	233 ha	Rp. 3.523.422.249	Pembangunan Hutan Rakyat diluar Kawasan Hutan Negara	Sulsel	Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	233 ha	Rp. 3.523.422.249	
			Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	233 ha	Rp.		Sulsel	Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	233 ha	Rp.	



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

No	Rancangan Akhir RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)		Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Yang Disusun.	1 dokumen	Rp. 0	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Yang Disusun.	1 dokumen	Rp. 0	
d	Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan.		Jumlah pelaksanaan pembinaan dan atau pengawasan rehabilitasi lahan	30 kali	Rp. 0	Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan.	Sulsel	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan atau pengawasan rehabilitasi lahan	30 kali	Rp. 0	
			Jumlah pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis	15 kali			Sulsel	Jumlah pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis	15 kali		
e	Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara		Luas lahan penghijauan lingkungan diluar kawasan hutan negara	10 ha	Rp. 0	Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara	Sulsel	Luas lahan penghijauan lingkungan diluar kawasan hutan negara	10 ha	Rp. 0	
5	<b>Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>		<b>Persentase Jumlah Kasus Kerusakan Kawasan hutan yang tertangani</b>	<b>100 %</b>	<b>Rp. 3.581.756.000</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Sulsel	<b>Persentase Jumlah Kasus Kerusakan Kawasan hutan yang tertangani</b>	<b>100 %</b>	<b>Rp. 3.581.756.000</b>	
a	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan		Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	1280 orang	Rp. 787.516.000	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Sulsel	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	424 orang	Rp. 787.516.000	
			Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	30 orang			Sulsel	Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	30 orang		
b	Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan		Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	768 kali patroli (48 kali/KPH)	Rp. 2.548.380.000	Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Sulsel	Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	768 kali patroli (48 kali/KPH)	Rp. 2.548.380.000	
			Jumlah papan bicara pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	5 unit/KPH			Sulsel	Jumlah papan bicara pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	5 unit/KPH		
c	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring perlindungan hutan	288 kali	Rp. 180.510.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Sulsel	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring perlindungan hutan	288 kali	Rp. 180.510.000	
			Jumlah lokasi pelaksanaan operasi gabungan penanganan tindak pidana khusus kehutanan	1 lokasi			Sulsel	Jumlah lokasi pelaksanaan operasi gabungan penanganan tindak pidana khusus kehutanan	1 lokasi		
d	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan		Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pencegahan dan	12 kali	Rp. 50.700.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan	Sulsel	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pencegahan dan	12 kali	Rp. 50.700.000	



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

No	Rancangan Akhir RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kebakaran Hutan dan lahan		penanggulangan kebakaran hutan			kebakaran Hutan dan lahan		penanggulangan kebakaran hutan			
			Jumlah laporan titik api (hot spot) yang dipantau dan dikendalikan	16 laporan			Sulsel	Jumlah laporan titik api (hot spot) yang dipantau dan dikendalikan	16 laporan		
6	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>		<b>Jenis HHBK yang diolah oleh pemegang izin</b>	<b>3 jenis</b>	<b>Rp. 0</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>		<b>Jenis HHBK yang diolah oleh pemegang izin</b>	<b>3 jenis</b>	<b>Rp. 0</b>	
a	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati		Jumlah Produksi HHBK yang diolah oleh pemegang izin	49.187,134 ton	Rp. 0	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Sulsel	Jumlah Produksi HHBK yang diolah oleh pemegang izin	49.187,134 ton	Rp. 0	
b	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (UIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah komitmen izin fasilitasi penerbitan UIPHBBK	5 izin	Rp. 0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (UIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sulsel	Jumlah komitmen izin fasilitasi penerbitan UIPHBBK	5 izin	Rp. 0	
c	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya		Luas areal budidaya HHBK	100 ha	Rp. 0	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Sulsel	Luas areal budidaya HHBK	100 ha	Rp. 0	
d	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu		Jumlah pemegang UIPHBBK yang diawasi	5 izin	Rp. 0	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Sulsel	Jumlah pemegang UIPHBBK yang diawasi	5 izin	Rp. 0	
7	<b>Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi &lt;6.000 M3 per tahun</b>		<b>Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan kayu</b>	<b>28.155,1717 ton</b>	<b>Rp. 52.480.000</b>					<b>Rp. 52.480.000</b>	
a	Rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/tahun		Jumlah industri yang aktif dan tertib aturan	60 industri	Rp. 0	Rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/tahun	Sulsel	Jumlah industri yang aktif dan tertib aturan	60 industri	Rp. 0	
			Jumlah data produksi kayu olahan	3 laporan			Sulsel	Jumlah data produksi kayu olahan	3 laporan		
			Jumlah data asal usul rencana pemenuhan bahan baku	16 laporan			Sulsel	Jumlah data asal usul rencana pemenuhan bahan baku	16 laporan		
b	Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun		Jumlah data sebaran GANIS PHPL yang melaksanakan PUHH pada industry	40 orang	Rp. 52.480.000	Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun	Sulsel	Jumlah data sebaran GANIS PHPL yang melaksanakan PUHH pada industry	40 orang	Rp. 52.480.000	
			Jumlah data pemasaran hasil hutan	24 laporan			Sulsel	Jumlah data pemasaran hasil hutan	24 laporan		





# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

No	Rancangan Akhir RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kayu 36ndus dan ekspor					kayu 36ndus dan ekspor			
			Jumlah 36ndustry yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi	60 industri			Sulsel	Jumlah 36ndustry yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi	60 industri		
8	Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan		Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit tanaman hutan	95 pemohon	Rp. 177.420.000	Perbenihan Tanaman Hutan		Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit tanaman hutan	95 pemohon	Rp. 177.420.000	
a	Penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/ atau bibit terdaftar		Jumlah pemohon pengada benih dan pengedar benih/bibit tanaman hutan terdaftar	36 pemohon	Rp. 0	Penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/ atau bibit terdaftar	Sulsel	Jumlah pemohon pengada benih dan pengedar benih/bibit tanaman hutan terdaftar	36 pemohon	Rp. 0	
			Jumlah calon sumber benih yang diidentifikasi	15 lokasi			Sulsel	Jumlah calon sumber benih yang diidentifikasi	15 lokasi		
b	Sertifikasi sumber benih		Jumlah pemohon sertifikasi sumber benih	30 pemohon	Rp. 50.340.000	Sertifikasi sumber benih	Sulsel	Jumlah pemohon sertifikasi sumber benih	30 pemohon	Rp. 50.340.000	
c	Sertifikasi mutu benih		Jumlah pemohon sertifikasi mutu benih	15 pemohon	Rp. 0	Sertifikasi mutu benih	Sulsel	Jumlah pemohon sertifikasi mutu benih	15 pemohon	Rp. 0	
d	Sertifikasi mutu bibit		Jumlah pemohon sertifikasi mutu bibit	50 pemohon	Rp. 50.340.000	Sertifikasi mutu bibit	Sulsel	Jumlah pemohon sertifikasi mutu bibit	50 pemohon	Rp. 50.340.000	
e	Pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit		Jumlah lokasi pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit tanaman hutan	24 kab/kota	Rp. 76.740.000	Pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit	Sulsel	Jumlah lokasi pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit tanaman hutan	24 kab/kota	Rp. 76.740.000	
B.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA		Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	6 jenis	Rp. 393.758.000	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA		Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	2 jenis	Rp. 393.758.000	
1	Kegiatan Perlindungan tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	100 penangkar	Rp. 393.758.000	Kegiatan Perlindungan tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	100 penangkar	Rp. 393.758.000	



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

No	Rancangan Akhir RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES		Jumlah peserta sosialisasi tata cara perizinan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	200 orang	Rp. 393.758.000	Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Sulsel	Jumlah peserta sosialisasi tata cara perizinan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	200 orang	Rp. 393.758.000	
			Jumlah laporan monitoring pengendalian dan pengawasan penangkar tumbuhan satwa liar yang tidak dilindungi	1 laporan			Makassar	Jumlah laporan monitoring pengendalian dan pengawasan penangkar tumbuhan satwa liar yang tidak dilindungi	1 laporan		
C	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>		<b>Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan</b>	<b>16,55 %</b>	<b>Rp. 21.903.248.414</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>		<b>Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan</b>	<b>16,25 %</b>	<b>Rp. 21.903.248.414</b>	
1	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah SDM bidang kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	60 sdm	Rp. 21.903.248.414	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah SDM bidang kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	60 sdm	Rp. 21.903.248.414	
			Jumlah masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya	1.000 orang (50 KTH)				Jumlah masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya	1.000 orang (50 KTH)		
			Jumlah usaha perhutanan sosial yang ditingkatkan	50 KTH				Jumlah usaha perhutanan sosial yang ditingkatkan	50 KTH		
			Jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	350 KTH				Jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	350 KTH		
a	Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan		Jumlah penyuluh kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	100 orang	Rp. 0	Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan	Sulsel	Jumlah penyuluh kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	100 orang	Rp. 0	
			Jumlah SDM Kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	200 orang			Sulsel	Jumlah SDM Kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	200 orang		
			Jumlah unit penyelenggara penyuluhan yang	16 unit penyelenggara			Sulsel	Jumlah unit penyelenggara penyuluhan yang	16 unit penyelenggara		



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

No	Rancangan Akhir RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dimonitoring dan dievaluasi					dimonitoring dan dievaluasi			
b	Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan		Jumlah KTH yang naik kelas kemampuan	2 KTH	Rp. 0	Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan	Sulsel	Jumlah KTH yang naik kelas kemampuan	2 KTH	Rp. 0	
			Jumlah kelompok tani/orang yang mengikuti lomba wana lestari dan kalpataru	7 klp/orang			Sulsel	Jumlah kelompok tani/orang yang mengikuti lomba wana lestari dan kalpataru	7 klp/orang		
			Jumlah pembentukan dan pengembangan wana wiyata widyakarya	1 kelompok			Sulsel	Jumlah pembentukan dan pengembangan wana wiyata widyakarya	1 kelompok		
c	Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial		Jumlah peserta sosialisasi/ Rapat Koordinasi perhutanan sosial	100 orang	Rp. 21.903.248.414	Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	Sulsel	Jumlah peserta sosialisasi/ Rapat Koordinasi perhutanan sosial	100 orang	Rp. 21.903.248.414	
			Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	84 kelompok tani/KTH			Sulsel	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	84 kelompok tani/KTH		
			Jumlah kelompok perhutanan sosial yang dimonitoring dan dievaluasi	82 kelompok			Sulsel	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang dimonitoring dan dievaluasi	82 kelompok		
			Jumlah peserta temu usaha KUPS	100 orang			Sulsel	Jumlah peserta temu usaha KUPS	100 orang		
			Jumlah laporan konflik tenurial PS yang difasilitasi penyelesaiannya	2 laporan			Sulsel	Jumlah laporan konflik tenurial PS yang difasilitasi penyelesaiannya	2 laporan		
			Jumlah produk KUPS yang dipromosikan	10 produk			Sulsel	Jumlah produk KUPS yang dipromosikan	10 produk		
D	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>		<b>Jumlah DAS yang direhabilitasi</b>	<b>2 DAS</b>	<b>Rp. 2.345.220.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>		<b>Jumlah DAS yang direhabilitasi</b>	<b>2 DAS</b>	<b>Rp. 2.345.220.000</b>	
1	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah DAS yang dikelola di Provinsi Sulawesi Selatan	2 DAS	Rp. 2.345.220.000	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sulsel	Jumlah DAS yang dikelola di Provinsi Sulawesi Selatan	2 DAS	Rp. 2.345.220.000	
a	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS		Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	2 dokumen	Rp. 0	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS	Sulsel	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	2 dokumen	Rp. 0	



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

No	Rancangan Akhir RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS		Jumlah DAS yang dioptimalisasikan fungsi dan daya dukungnya	2 DAS	Rp. 0	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Sulsel	Jumlah DAS yang dioptimalisasikan fungsi dan daya dukungnya	2 DAS	Rp. 0	
c	Penerapan teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS		Jumlah unit dam penahan	34 unit	Rp. 2.345.220.000	Penerapan teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS	Sulsel	Jumlah unit dam penahan	34 unit	Rp. 2.345.220.000	
			Jumlah unit gully plug	22 unit			Sulsel	Jumlah unit gully plug	22 unit		
			Jumlah unit sumur resapan	80 unit			Sulsel	Jumlah unit sumur resapan	80 unit		
d	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		Jumlah masyarakat dan pihak terkait yang hadir dan berpartisipasi pada kegiatan penanaman	250 orang	Rp. 0	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Sulsel	Jumlah masyarakat dan pihak terkait yang hadir dan berpartisipasi pada kegiatan penanaman	250 orang	Rp. 0	
e	Pengembangan Kelembagaan pengelolaan DAS		Jumlah pertemuan rapat yang dilaksanakan	4 kali	Rp. 0	Pengembangan Kelembagaan pengelolaan DAS	Sulsel	Jumlah pertemuan rapat yang dilaksanakan	4 kali	Rp. 0	
f	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	1 tahun	Rp. 0	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	Sulsel	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	1 tahun	Rp. 0	
			Jumlah pertemuan atau rapat yang dilaksanakan	4 kali			Sulsel	Jumlah pertemuan atau rapat yang dilaksanakan	4 kali		
E	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>Rp. 113.909.694.309</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>Rp. 113.909.694.309</b>	
			<b>Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik</b>	<b>100 %</b>				<b>Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik</b>	<b>100 %</b>		
			<b>Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)</b>	<b>100 %</b>				<b>Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)</b>	<b>100 %</b>		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	Rp. 1.357.687.500	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	Rp. 1.357.687.500	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah	2 dokumen	Rp. 1.278.617.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah	2 dokumen	Rp. 1.278.617.500	



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

No	Rancangan Akhir RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	Rp. 0	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	Rp. 0	
c	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	Rp. 0	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	Rp. 0	
d	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	Rp. 79.070.000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	Rp. 79.070.000	
e	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	Rp. 0	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	Rp. 0	
f	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	2 dokumen	Rp. 0	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Makassar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	2 dokumen	Rp. 0	
g	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	Rp. 0	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Makassar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	Rp. 0	
			Jumlah laporan data dan informasi yang dikumpulkan dan dipublikasikan	2 laporan			Makassar	Jumlah laporan data dan informasi yang dikumpulkan dan dipublikasikan	2 laporan		
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	Rp. 99.740.180.584	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Makassar	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	Rp. 99.740.180.584	
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah ASN yang terbayarkan gaji, tunjangan dan TPP	843 orang	Rp. 99.740.180.584	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Makassar	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji, tunjangan dan TPP	843 orang	Rp. 99.740.180.584	
b	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Jumlah aparat SKPD yang dikelola administrasi kepegawaianya	843 orang	Rp. 0	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Makassar	Jumlah aparat SKPD yang dikelola administrasi kepegawaianya	843 orang	Rp. 0	
			Jumlah administrasi yang disusun	1 laporan			Makassar	Jumlah administrasi yang disusun	1 laporan		
c	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD		Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	50 dokumen	Rp. 0	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Makassar	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	50 dokumen	Rp. 0	
d	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD		Jumlah pelaporan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 laporan	Rp. 0	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah pelaporan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 laporan	Rp. 0	
e	Koordinasi dan penyusunan laporan		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	Rp. 46.925.000	Koordinasi dan penyusunan laporan	Makassar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	Rp. 46.925.000	



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

No	Rancangan Akhir RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	keuangan akhir tahun SKPD					keuangan akhir tahun SKPD					
f	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	1 laporan	Rp. 85.880.000	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	1 laporan	Rp. 85.880.000	
g	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD		Jumlah pelaporan keuangan yang tersusun	18 laporan	Rp. 116.065.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Makassar	Jumlah pelaporan keuangan yang tersusun	18 laporan	Rp. 116.065.000	
h	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		Jumlah pelaporan prognosis yang tersusun	2 laporan	Rp. 0	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Makassar	Jumlah pelaporan prognosis yang tersusun	2 laporan	Rp. 0	
3	Kegiatan Administarsi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Jumlah Penyusunan dokumen laporan barang milik daerah	2 dokumen	Rp. 0	Kegiatan Administarsi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Penyusunan dokumen laporan barang milik daerah	2 dokumen	Rp. 0	
a	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD		Jumlah laporan penilaian barang milik daerah SKPD	1 dokumen	Rp. 0	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Makassar	Jumlah laporan penilaian barang milik daerah SKPD	1 dokumen	Rp. 0	
b	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan penyusunan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	Rp. 0	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah laporan penyusunan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	Rp. 0	
c	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	Rp. 0	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	Rp. 0	
4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	Rp. 1.712.430.000	Rp. 0	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	Rp. 1.712.430.000	Rp. 0	
a	Perencanaan pengelolaan retribusi daerah		Jumlah laporan perencanaan pengelolaan retribusi daerah	1 laporan	Rp. 0	Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Makassar	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan retribusi daerah	1 laporan	Rp. 0	
b	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah kebijakan retribusi daerah yang disebarluaskan	1 laporan	Rp. 0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah kebijakan retribusi daerah yang disebarluaskan	1 laporan	Rp. 0	
c	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah laporan objek retribusi daerah	1 laporan	Rp. 0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah laporan objek retribusi daerah	1 laporan	Rp. 0	
d	Pengolahan Data Retribusi Daerah		Jumlah laporan data retribusi daerah	1 laporan	Rp. 0	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah laporan data retribusi daerah	1 laporan	Rp. 0	
e	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah		Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	1 laporan	Rp. 0	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Makassar	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	1 laporan	Rp. 0	



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

No	Rancangan Akhir RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	90	Rp. 78.645.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Makassar	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	90	Rp. 78.645.000	
a	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	809 orang	Rp. 0	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Makassar	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	809 orang	Rp. 0	
			Jumlah pakaian lapangan yang diadakan	319 orang			Makassar	Jumlah pakaian lapangan yang diadakan	399 orang		
			Jumlah pakaian korpri yang diadakan	809 orang			Makassar	Jumlah pakaian korpri yang diadakan	809 orang		
			Jumlah pakaian batik khas daerah yang diadakan	809 orang			Makassar	Jumlah pakaian batik khas daerah yang diadakan	809 orang		
			Jumlah pakaian olahraga dan perlengkapannya yang diadakan	809 orang			Makassar	Jumlah pakaian olahraga dan perlengkapannya yang diadakan	809 orang		
b	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diadakan	1 laporan	Rp. 78.645.000	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Makassar	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diadakan	1 laporan	Rp. 78.645.000	
c	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian		Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian	1 laporan	Rp. 0	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Makassar	Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian	1 laporan	Rp. 0	
d	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		Jumlah laporan hasil evaluasi penilaian kinerja pegawai	1 laporan	Rp. 0	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Makassar	Jumlah laporan hasil evaluasi penilaian kinerja pegawai	1 laporan	Rp. 0	
e	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah aparat SKPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 orang	Rp. 0	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Makassar	Jumlah aparat SKPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 orang	Rp. 0	
f	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah sosialisasi peraturan Perundang-undangan	100 orang	Rp. 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah sosialisasi peraturan Perundang-undangan	100 orang	Rp. 0	
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	Rp. 1.045.207.600	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Makassar	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	Rp. 1.045.207.600	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	26 unit	Rp. 0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Makassar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	26 unit	Rp. 0	



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

No	Rancangan Akhir RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	300 unit	Rp. 0	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Makassar	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	300 unit	Rp. 0	
c	Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	10 jenis	Rp. 0	Penyediaan peralatan rumah tangga	Makassar	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	10 jenis	Rp. 0	
d	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah logistik yang tersedia	2 jenis	Rp. 434.164.600	Penyediaan bahan logistik kantor	Makassar	Jumlah logistik yang tersedia	2 jenis	Rp. 434.164.600	
e	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	Rp. 0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Makassar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	Rp. 0	
f	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 tahun	Rp. 0	Fasilitasi kunjungan tamu	Makassar	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 tahun	Rp. 0	
g	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas	1 tahun	Rp. 611.043.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah perjalanan dinas	1 tahun	Rp. 611.043.000	
h	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah arsip dinamis SKPD yang tertata	50 arsip	Rp. 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah arsip dinamis SKPD yang tertata	50 arsip	Rp. 0	
i	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang tersedia	3 sistem	Rp. 0	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang tersedia	3 sistem	Rp. 0	
7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Rp. 0	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Rp. 0	
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	1 unit	Rp. 0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	1 unit	Rp. 0	
b	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaan kendaraan operasional dinas	1 unit	Rp. 0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah pengadaan kendaraan operasional dinas	1 unit	Rp. 0	
c	Pengadaan mebel		Jumlah lemari arsip yang tersedia	60 unit	Rp. 0	Pengadaan mebel	Makassar	Jumlah lemari arsip yang tersedia	60 unit	Rp. 0	
			Jumlah meja kerja pejabat eselon/staf yang tersedia	100 unit			Makassar	Jumlah meja kerja pejabat eselon/staf yang tersedia	100 unit		
			Jumlah kursi kerja pejabat eselon/staf yang tersedia	100 unit			Makassar	Jumlah kursi kerja pejabat eselon/staf yang tersedia	100 unit		
d	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	1 unit	Rp. 0	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	1 unit	Rp. 0	





# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

No	Rancangan Akhir RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	8 unit	Rp. 0	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	8 unit	Rp. 0	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	8 unit	Rp. 0	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	8 unit	Rp. 0	
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp. 10.761.893.320	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp. 10.761.893.320	
a	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	1 tahun	Rp. 0	Penyediaan jasa surat menyurat	Makassar	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	1 tahun	Rp. 0	
b	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	1 tahun	Rp. 775.283.080	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Makassar	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	1 tahun	Rp. 775.283.080	
c	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 tahun	Rp. 0	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Makassar	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 tahun	Rp. 0	
d	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah jasa tenaga non PNS	369 orang	Rp. 9.986.610.240	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Makassar	Jumlah jasa tenaga non PNS	369 orang	Rp. 9.986.610.240	
9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	Rp. 926.080.305	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	Rp. 926.080.305	
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	1 unit	Rp. 84.160.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Makassar	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	1 unit	Rp. 84.160.000	
			Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	1 unit			Makassar	Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	1 unit		
			Jumlah pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan roda 4	1 unit			Makassar	Jumlah pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan roda 4	1 unit		
b	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	43 unit	Rp. 567.024.800	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Makassar	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	43 unit	Rp. 567.024.800	



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

No	Rancangan Akhir RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	43 unit			Makassar	Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	43 unit		
			Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4	39 unit			Makassar	Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4	39 unit		
			Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 2	382 unit			Makassar	Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 2	382 unit		
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	10 unit	Rp. 0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	10 unit	Rp. 0	
d	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah aset tak berwujud yang di pelihara	5 unit	Rp. 0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah aset tak berwujud yang di pelihara	5 unit	Rp. 0	
e	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25 unit	Rp. 274.895.505	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Makassar	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25 unit	Rp. 274.895.505	
f	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 tahun	Rp. 0	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 tahun	Rp. 0	
g	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 tahun	Rp. 0	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 tahun	Rp. 0	
<b>Total</b>					<b>Rp. 145.947.468.972</b>	<b>Total</b>					<b>Rp. 145.947.468.972</b>





### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

#### 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan merupakan kondisi yang akan dicapai dalam RPJMD di Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020 - 2023 dalam bentuk pernyataan-pernyataan dalam mendukung pencapaian visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perwujudan pencapaian misi pembangunan. Sedangkan sasaran pembangunan adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan berupa hasil pembangunan daerah.

Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2023 merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasi secara terukur, spesifik dan dapat dicapai secara rasional dalam kurun waktu 3 tahun ke depan (2021-2023). Sasaran ini juga juga menampilkan sasaran pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 yang merupakan tahapan akhir dari pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan.

Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2018- 2023 berdasarkan Misi, dijabarkan sebagai berikut:

1. Penjabaran tujuan pada Misi 1 adalah: Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, dengan rumusan sasaran sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
  - b. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penjabaran tujuan pada Misi 2 adalah: Meningkatkan Pemerataan infrastruktur wilayah, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah
3. Penjabaran tujuan pada Misi 3 adalah: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah
  - b. Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat



4. Penjabaran tujuan pada Misi 4 adalah: Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan
  - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
  - c. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan
  - d. Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat.
5. Penjabaran tujuan pada Misi 5 terbagi atas 2 tujuan yaitu :
  - a. Meningkatkan produktivitas pertumbuhan nilai tambah produk unggulan daerah, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
    - a.1 Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah
  - b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan rumusan sasaran:
    - b. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

### 3.1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021

Rancangan Tema RKP tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

Untuk mewujudkan tema tersebut maka ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :



Sasaran pembangunan nasional tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan



manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, dengan indikator pembangunan sebagai berikut :

**Perubahan Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021**

Indikator Pembangunan	Target Rancangan RKP Tahun 2021	Target RKP Nasional Tahun 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5–5,5	4,5–5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,5–8,2	7,7–9,1
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2–9,7	9,2–9,7
Rasio Gini (indeks)	0,377–0,379	0,377–0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78–72,90	72,78–72,95
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) <i>*menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)</i>	23,55–24,14	23,55–24,05

Sumber:

1. Peraturan Menteri Ppn/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
2. Perpres Nomor 86 tahun 2020 Tentang RKP Tahun 2021

### 3.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Prioritas tahun 2021 banyak dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi (perubahan besar-besaran) pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Sulawesi selatan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2021 yaitu : **Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial didukung Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:



1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan
4. Percepatan Pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial
5. Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayanan publik.



**Tabel 5**  
Perubahan Prioritas, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Tahun 2021

RKPD Pokok 2021			Perubahan RKPD tahun 2021 berdasarkan P-RPJMD Tahun 2018-2023		
Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran dan pembangunan 2021	Indikator Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran dan pembangunan 2021	Indikator Pembangunan
1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	IPM (Nilai/Angka)	Pembangunan Manusia	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	IPM
		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	Indeks Pendidikan
		Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan
		Umur Harapan Hidup (Tahun)		Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan daya saing daerah	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (% Periode Agustus)		Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
		iDG (Indeks Pemberdayaan Gender)			
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Berkembangnya komoditas unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%: ADHK)	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan dan Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Menurunya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	Rasio Gini
		PDRB Kawasan (luwu Utara, Selayar, Bone) (Rp. ADHK)		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah	Gini Ratio (Periode: September)		Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	PDRB Perkapita ADHB





RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021

	Berkembangnya Pembangunan Desa	Indeks Williamson			Tingkat Kemiskinan
		Rata-Rata Nilai Indeks Pembangunan Desa			
3. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur
		Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, dan Pengadaan Air (% / ADHK)			
4. Percepatan Pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial	Meningkatnya kinerja ekonomi makro	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Percepatan Pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial
		PDRB Perkapita ADHB (Rp.)			Proporsi rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)
	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%) (September)			
		Tingkat Pengangguran Terbuka TPT (%) (Periode Agustus)			
	Membaiknya stabilitas ekonomi makro	Tingkat Inflasi (%)			
	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial			
		Proporsi rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)			
	Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah berbasis	Produktifitas Total daerah			



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021

	sumberdaya alam				
5. Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	IKLH
	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)
	Meningkatnya nilai tambah Produk unggulan daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Pertumbuhan ekonomi
		Pertumbuhan nilai ekspor (%)		Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Produktifitas Total Daerah
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayanan publik	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayanan public	Indeks Reformasi Birokrasi	Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan public	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi
		Nilai SAKIP		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Indeks Pelayanan Publik



Perubahan target sasaran makro pembangunan Sulawesi Selatan sesuai perubahan RPJMD tahun 2018-2023 sebagai berikut :

No.	Indikator Makro Pembangunan	Realisasi 2019	Target RKPD Tahun 2021	Target Perubahan RKPD Tahun 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,92	6,10	4,10-5,55
2	PDRB per kapita (ADHB)	57,03	65,76	59,23
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) - Agustus	4,97	7,20	6,08
	Jumlah Penganggur			
4	Tingkat Kemiskinan (Sept.)	8,56	9,10	8,70
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,66	72,22	72,20
6	Gini Rasio (September)	0,391	0,414	0,382
7	Indeks Williamson	0,630	0,610	0,610
8	Tingkat Inflasi (%)	2,35	3,5 ± 1,0	3,0 ± 1,0

### 3.3. Arah dan kebijakan daerah tahun 2021

Adapun arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021, sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021**

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan
1	Misi 1 Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif - Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur
		2	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	
2	Misi-2: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel - Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	3	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	Peningkatan jangkauan, kualitas dan kuantitas jalan provinsi serta wilayah terisolir
				Penyediaan dan pengembangan infrastruktur pendukung pelabuhan, dermaga, terminal dan bandara
3	Misi-3: Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata	4	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit untuk mendukung produksi ekonomi unggulan daerah
				Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata;
				Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata;
				Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata
4	Misi-4: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter - Meningkatkan Kualitas SDM secara inklusif	5	Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
		6	Meningkatnya kualitas dan pemerataan Pendidikan	Penguatan pendidikan vokasional untuk menghasilkan tamatan yang bisa menciptakan lapangan kerja
		7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Perbaikan pelayanan kesehatan khususnya perbaikan pada 1.000 hari pertama kehidupan serta upaya



Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan
				preventif penanganan stunting
		8	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja formal
		9	Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Penguatan koordinasi penyelenggaraan pembinaan nilai-nilai keagamaan dan budaya lintas kabupaten kota Mendorong partisipasi masyarakat dan Lembaga keagamaan untuk meningkatkan aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat
		10	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha dan lembaga masyarakat
5	Misi-5: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan - Meningkatkan produktivitas pertumbuhan nilai tambah produk unggulan daerah - Meningkatkan produktivitas pertumbuhan nilai tambah produk unggulan daerah	11	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Akselerasi peningkatan nilai tambah dan daya saing produk berbasis sumber daya alam
		12	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan penanggulangan bencana Penanganan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup

### 3.3.1 Sasaran Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mendukung pencapaian RPJMD tahun 2018-2023 pada :

**Tabel 7**

#### Keterkaitan RPJMD dan Renstra

Misi		RPJMD		Sasaran		Renstra
		Tujuan				Tujuan Dinas
3	Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif	3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata	5	Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat	Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan
5	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan	5	Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	10	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	
		11	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	11	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	

Tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan kepada Visi, Misi dan Tujuan RPJMD, prioritas isu-isu strategis, serta memperhatikan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat. Tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan **“Mengoptimalkan Pengelolaan Kawasan Hutan”**

Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 sebagai berikut:



**Tabel 8**  
**Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Tahun 2021 dan 2022**

Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja tahun 2021	Target Kinerja tahun 2022
1	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Persen	75	75
		1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	75	75
				Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	Persen	90	90
				Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	Persen	90	90
				Persentase Temuan Material	Persen	5	2
2	Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan			Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Kewenangan Provinsi	Ha	1.780.029	1.780.029
		2	Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	58,64	58,66
		3	Meningkatnya Kontribusi Kehutanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Kontribusi PDRB Kehutanan terhadap PDRB Sulsel	Persen	0,07	0,07
				Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	Ha	12.000	12.000
		4	Meningkatnya Akses Legal Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan baik laki-laki maupun perempuan melalui Perhutanan Sosial dan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati	Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	Persen	6,77	7,89
				Persentase Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata	Persen	10	15
		5	Terjaganya Fungsi dan Legalitas Kawasan Hutan	Persentase Luas kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	Persen	64,67	64,67
				Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	KPH	24	24



### 3.4 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 mencakup 5 (lima) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 93 (Sembilan puluh tiga) sub kegiatan. Program dan kegiatan disusun untuk pencapaian visi, misi Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang pada RPJMD tahun 2018-2023.

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Hutan, terdiri atas kegiatan
  - a. Kegiatan pengelolaan rencana tata hutan KPH kewenangan provinsi, dengan sub kegiatan:s
    - Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah KPH
    - Pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH
    - Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana operasionalisasi KPH
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
  - b. Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), dengan sub kegiatan :
    - Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, dengan sub kegiatan :
    - Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung
    - Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan/atau Jasa Lingkungan
  - d. Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, dengan sub kegiatan :
    - Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan
    - Pembangunan Hutan Rakyat diluar Kawasan Hutan Negara
    - Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
    - Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan.
    - Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara
  - e. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dengan sub kegiatan :



- Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan
  - Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan
- f. Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dengan sub kegiatan:
- Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati
  - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
  - Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu
- g. Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 m<sup>3</sup> per tahun, dengan sub kegiatan :
- Rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m<sup>3</sup>/tahun
  - Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 m<sup>3</sup> per tahun
- h. Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan, dengan sub kegiatan :
- Penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/ atau bibit terdaftar
  - Sertifikasi sumber benih
  - Sertifikasi mutu benih
  - Sertifikasi mutu bibit
  - Pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit
2. Program konservasi sumberdaya alam dan ekosistem, dengan kegiatan :
- a. Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
- Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES
3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, dengan kegiatan :



- a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, dengan sub kegiatan :
  - Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan
  - Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial
4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dengan kegiatan :
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:
    - Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS
    - Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS
    - Penerapan teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS
    - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
    - Pengembangan Kelembagaan pengelolaan DAS
    - Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS
5. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dengan kegiatan :
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
    - Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
    - Evaluasi kinerja perangkat daerah
  - b. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
    - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
    - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
    - Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
    - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
    - Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
    - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD
    - Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran





- c. Kegiatan Administarsi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD
  - Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
  - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Perencanaan pengelolaan retribusi daerah
  - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
  - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
  - Pengolahan Data Retribusi Daerah
  - Pelaporan pengelolaan retribusi daerah
- e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;
  - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
  - Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
  - Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
  - Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
  - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan peralatan rumah tangga
  - Penyediaan bahan logistik kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Fasilitasi kunjungan tamu
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
- g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan mebel



- Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
  - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
  - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
  - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
  - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
  - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

Program dan kegiatan tersebut diatas, merupakan program dan kegiatan yang juga mendukung program kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di kabupaten/kota. Terdapat 16 unit KPH sebagai UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki tugas fungsi perencanaan, pelayanan teknis pengelolaan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan.







## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana kerja dan pendanaan perubahan tahun 2021 memuat program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian sasaran Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, serta mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kehutanan.

Rencana kerja program dan kegiatan prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang mendukung prioritas provinsi pada perubahan rencana kerja tahun 2021, sebagai berikut :



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021

Tabel 9

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021  
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan**

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum m Perubahan	Setelah Perubaha n	Sebelum Perubahan	Setelah Perubaha n	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Urusan Pilihan		Urusan Pilihan								
						Bidang Kehutanan		Bidang Kehutanan								
						<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi	Sulsel	Sulsel	65,47%	65,47%	4.771.522.850	7.395.548.249	2.624.025.399
							Persentase kerusakan hutan		Persentase kerusakan hutan	Sulsel	Sulsel	14,82%	14,82%			
							Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan		Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	Sulsel	Sulsel	92.336,62 m <sup>3</sup>	92.336,62 m <sup>3</sup>			
							Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu		Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	Sulsel	Sulsel	283 ton	283 ton			
						Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Kewenangan Provinsi	Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Kewenangan Provinsi	Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	Sulsel	Sulsel	1.780.029 ha	1.780.029 ha	-	-	
						Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah KPH	Jumlah dokumen rancang bangun KPH	Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah KPH	Jumlah dokumen rancang bangun KPH	Sulsel	Sulsel	11 dokumen	11 dokumen	-	-	



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH	Jumlah patok batas blok dan petak	Pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH	Jumlah patok batas blok dan petak	Sulsel	Sulsel	748 buah	748 buah		-	
							Panjang penataan batas blok dan petak		Panjang penataan batas blok dan petak	Sulsel	Sulsel	150 km	150 km			
						Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah jenis sarana prasarana operasionalisasi KPH	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah jenis sarana prasarana operasionalisasi KPH	Sulsel	Sulsel	3 jenis	3 jenis		-	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Luas Wilayah yang diusulkan untuk perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Luas Wilayah yang diusulkan untuk perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Sulsel	Sulsel	500 ha	500 ha		-	
						Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencanan Pengelolaan KPH	Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencanan Pengelolaan KPH	Sulsel	Sulsel	24 dokumen	24 dokumen	-	-	



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP KPH	Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP KPH	Sulsel	Sulsel	15 dokumen	15 dokumen		-	
							Jumlah dokumen RPHJPD		Jumlah dokumen RPHJPD	Sulsel	Sulsel	9 dokumen	9 dokumen			
						<b>Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	<b>Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan</b>	<b>Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	<b>Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan</b>	Sulsel	Sulsel	<b>Rp. 25.000.000</b>	<b>Rp. 25.000.000</b>	<b>75.120.000</b>	<b>75.120.000</b>	<b>-</b>
						Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan produksi	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan produksi	Sulsel	Sulsel	110.425,79 ha	110.425,79 ha	75.120.000	75.120.000	-
							Jumlah izin wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan produksi		Jumlah izin wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan produksi	Sulsel	Sulsel	60 izin	60 izin			
							Jumlah produksi HHHK di kawasan hutan produksi		Jumlah produksi HHHK di kawasan hutan produksi	Sulsel	Sulsel	3.041,94 ton	3.041,94 ton			





**RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021**

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Lokasi 'Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan lindung	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Lokasi 'Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan lindung	Sulsel	Sulsel	16 lokasi	16 lokasi		-	
							Jumlah Lokasi wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan lindung		Jumlah Lokasi wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan lindung	Sulsel	Sulsel	16 lokasi	16 lokasi			
							Jumlah Lokasi produksi HHBK di kawasan hutan lindung		Jumlah Lokasi produksi HHBK di kawasan hutan lindung	Sulsel	Sulsel	16 lokasi	16 lokasi			
						Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	Sulsel	Sulsel	1 lokasi	1 lokasi		-	
						<b>Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara</b>	<b>Luas rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara</b>	<b>Luas rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara</b>	Sulsel	Sulsel	<b>1.571 ha</b>	<b>1.571 ha</b>	<b>1.905.796.850</b>	<b>3.523.422.249</b>	<b>1.617.625.399</b>



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah lokasi sumber benih unggul yang dikembangkan	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah lokasi sumber benih unggul yang dikembangkan	Sulsel	Sulsel	5 lokasi	5 lokasi		-	
							Jumlah unit persemaian		Jumlah unit persemaian	Sulsel	Sulsel	11 lokasi	11 lokasi		-	
						Pembangunan Hutan Rakyat diluar Kawasan Hutan Negara	Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	Pembangunan Hutan Rakyat diluar Kawasan Hutan Negara	Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	Sulsel	Sulsel	233 ha	233 ha	1.720.536.000	3.523.422.249	<b>1.802.886.249</b>
							Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	Sulsel	Sulsel	233 ha	233 ha		-	
						Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Yang Disusun.	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Yang Disusun.	Sulsel	Sulsel	1 dokumen	1 dokumen		-	
						Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan.	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan atau pengawasan rehabilitasi lahan	Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan.	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan atau pengawasan rehabilitasi lahan	Sulsel	Sulsel	30 kali	30 kali	185.260.850	-	<b>(185.260.850)</b>
							Jumlah pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis		Jumlah pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis	Sulsel	Sulsel	15 kali	15 kali			



**RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021**

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara	Luas lahan penghijauan lingkungan diluar kawasan hutan negara	Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara	Luas lahan penghijauan lingkungan diluar kawasan hutan negara	Sulsel	Sulsel	10 ha	10 ha		-	
						<b>Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>Persentase Jumlah Kasus Kerusakan Kawasan hutan yang tertangani</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>Persentase Jumlah Kasus Kerusakan Kawasan hutan yang tertangani</b>	Sulsel	Sulsel	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.508.976.000</b>	<b>3.567.106.000</b>	<b>1.058.130.000</b>
						Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Sulsel	Sulsel	1280 orang	1280 orang	799.836.000	787.516.000	<b>(12.320.000)</b>
							Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan		Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	Sulsel	Sulsel	30 orang	30 orang			
						Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Sulsel	Sulsel	768 kali patroli (48 kali/KPH)	768 kali patroli (48 kali/KPH)	1.370.880.000	2.548.380.000	<b>1.177.500.000</b>



**RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021**

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
							Jumlah papan bicara pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan		Jumlah papan bicara pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Sulsel	Sulsel	5 unit/KPH	5 unit/KPH			
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring perlindungan hutan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring perlindungan hutan	Sulsel	Sulsel	288 kali	288 kali	238.630.000	180.510.000	<b>(58.120.000)</b>
							Jumlah lokasi pelaksanaan operasi gabungan penanganan tindak pidana khusus kehutanan		Jumlah lokasi pelaksanaan operasi gabungan penanganan tindak pidana khusus kehutanan	Sulsel	Sulsel	1 lokasi	1 lokasi			
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	Sulsel	Sulsel	12 kali	12 kali	99.630.000	50.700.000	<b>(48.930.000)</b>



**RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021**

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
							Jumlah laporan titik api (hot spot) yang dipantau dan dikendalikan		Jumlah laporan titik api (hot spot) yang dipantau dan dikendalikan	Sulsel	Sulsel	16 laporan	16 laporan			
						<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>	<b>Jenis HHBK yang diolah oleh pemegang izin</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>	<b>Jenis HHBK yang diolah oleh pemegang izin</b>	Sulsel	Sulsel	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>	-	-	
						Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Produksi HHBK yang diolah oleh pemegang izin	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Produksi HHBK yang diolah oleh pemegang izin	Sulsel	Sulsel	49.187,134 ton	49.187,134 ton		-	
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah komitmen izin fasilitasi penerbitan IUIPHHBK	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah komitmen izin fasilitasi penerbitan IUIPHHBK	Sulsel	Sulsel	5 izin	5 izin		-	



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode							Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum m Perubahan	Setelah Perubaha n	Sebelum Perubahan	Setelah Perubaha n	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
							Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas areal budidaya HHBK	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas areal budidaya HHBK	Sulsel	Sulsel	100 ha	100 ha			-
							Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah pemegang IUIPHHBK yang diawasi	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah pemegang IUIPHHBK yang diawasi	Sulsel	Sulsel	5 izin	5 izin			-
							Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun	Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan kayu	Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun	Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan kayu	Sulsel	Sulsel	28.155,171 ton	28.155,1717 ton	80.170.000	52.480.000	(27.690.000)
							Rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/tahun	Jumlah industri yang aktif dan tertib aturan	Rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/tahun	Jumlah industri yang aktif dan tertib aturan	Sulsel	Sulsel	60 industri	60 industri			-
								Jumlah data produksi kayu olahan		Jumlah data produksi kayu olahan	Sulsel	Sulsel	3 laporan	3 laporan			
								Jumlah data asal usul rencana pemenuhan bahan baku		Jumlah data asal usul rencana pemenuhan bahan baku	Sulsel	Sulsel	16 laporan	16 laporan			



**RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021**

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun	Jumlah data sebaran GANIS PHPL yang melaksanakan PUHH pada industry	Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun	Jumlah data sebaran GANIS PHPL yang melaksanakan PUHH pada industry	Sulsel	Sulsel	40 orang	40 orang	80.170.000	52.480.000	<b>(27.690.000)</b>
							Jumlah data pemasaran hasil hutan kayu ndus dan ekspor		Jumlah data pemasaran hasil hutan kayu ndus dan ekspor	Sulsel	Sulsel	24 laporan	24 laporan			
							Jumlah ndustry yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi		Jumlah ndustry yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi	Sulsel	Sulsel	60 industri	60 industri			
						<b>Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan</b>	<b>Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit tanaman hutan</b>	<b>Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan</b>	<b>Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit tanaman hutan</b>	Sulsel	Sulsel	<b>95 pemohon</b>	<b>95 pemohon</b>	<b>201.460.000</b>	<b>177.420.000</b>	<b>(24.040.000)</b>
						Penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/ atau bibit terdaftar	Jumlah pemohon pengada benih dan pengedar benih/bibit tanaman hutan terdaftar	Penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/ atau bibit terdaftar	Jumlah pemohon pengada benih dan pengedar benih/bibit tanaman hutan terdaftar	Sulsel	Sulsel	36 pemohon	36 pemohon		-	



**RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021**

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
							Jumlah calon sumber benih yang diidentifikasi		Jumlah calon sumber benih yang diidentifikasi	Sulsel	Sulsel	15 lokasi	15 lokasi			
						Sertifikasi sumber benih	Jumlah pemohon sertifikasi sumber benih	Sertifikasi sumber benih	Jumlah pemohon sertifikasi sumber benih	Sulsel	Sulsel	30 pemohon	30 pemohon	50.340.000	50.340.000	-
						Sertifikasi mutu benih	Jumlah pemohon sertifikasi mutu benih	Sertifikasi mutu benih	Jumlah pemohon sertifikasi mutu benih	Sulsel	Sulsel	15 pemohon	15 pemohon	50.340.000	-	<b>(50.340.000)</b>
						Sertifikasi mutu bibit	Jumlah pemohon sertifikasi mutu bibit	Sertifikasi mutu bibit	Jumlah pemohon sertifikasi mutu bibit	Sulsel	Sulsel	50 pemohon	50 pemohon	-	50.340.000	<b>50.340.000</b>
						Pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit	Jumlah lokasi pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit tanaman hutan	Pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit	Jumlah lokasi pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit tanaman hutan	Sulsel	Sulsel	24 kab/kota	24 kab/kota	100.780.000	76.740.000	<b>(24.040.000)</b>
						<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata</b>	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata</b>	Sulsel	Sulsel	<b>6 jenis</b>	<b>6 jenis</b>	<b>393.758.000</b>	<b>393.758.000</b>	-





**RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021**

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Sulsel	Sulsel	100 penangkar	100 penangkar	393.758.000	393.758.000	-
						Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Jumlah peserta sosialisasi tata cara perizinan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Jumlah peserta sosialisasi tata cara perizinan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Sulsel	Sulsel	200 orang	200 orang	393.758.000	393.758.000	-



**RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021**

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
							Jumlah laporan monitoring pengendalian dan pengawasan penangkar tumbuhan satwa liar yang tidak dilindungi		Jumlah laporan monitoring pengendalian dan pengawasan penangkar tumbuhan satwa liar yang tidak dilindungi	Sulsel	Sulsel	1 laporan	1 laporan			
						<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	Sulsel	Sulsel	16,55%	16,55%	20.620.155.000	21.903.248.414	1.283.093.414
						Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	Sulsel	Sulsel	60 sdm	60 sdm	20.620.155.000	21.903.248.414	1.283.093.414
							Jumlah masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya		Jumlah masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya	Sulsel	Sulsel	1.000 orang (50 KTH)	1.000 orang (50 KTH)			



**RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021**

Kode							Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
								Jumlah usaha perhutanan sosial yang ditingkatkan		Jumlah usaha perhutanan sosial yang ditingkatkan	Sulsel	Sulsel	50 KTH	50 KTH			
								Jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan		Jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	Sulsel	Sulsel	350 KTH	350 KTH			
							Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	Sulsel	Sulsel	100 orang	100 orang		-	
								Jumlah SDM Kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya		Jumlah SDM Kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	Sulsel	Sulsel	200 orang	200 orang			
								Jumlah unit penyelenggara penyuluhan yang dimonitoring dan dievaluasi		Jumlah unit penyelenggara penyuluhan yang dimonitoring dan dievaluasi	Sulsel	Sulsel	16 unit penyelenggara	16 unit penyelenggara			



**RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021**

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan	Jumlah KTH yang naik kelas kemampuan	Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan	Jumlah KTH yang naik kelas kemampuan	Sulsel	Sulsel	2 KTH	2 KTH		-	
							Jumlah kelompok tani/orang yang mengikuti lomba wana lestari dan kalpataru		Jumlah kelompok tani/orang yang mengikuti lomba wana lestari dan kalpataru	Sulsel	Sulsel	7 klp/orang	7 klp/orang			
							Jumlah pembentukan dan pengembangan wana wiyata widyakarya		Jumlah pembentukan dan pengembangan wana wiyata widyakarya	Sulsel	Sulsel	1 kelompok	1 kelompok			
						Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	Jumlah peserta sosialisasi/ Rapat Koordinasi perhutanan sosial	Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	Jumlah peserta sosialisasi/ Rapat Koordinasi perhutanan sosial	Sulsel	Sulsel	100 orang	100 orang	20.620.155.000	21.903.248.414	<b>1.283.093.414</b>
							Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif		Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	Sulsel	Sulsel	84 kelompok tani/KTH	84 kelompok tani/KTH			
							Jumlah kelompok perhutanan sosial yang dimonitoring dan dievaluasi		Jumlah kelompok perhutanan sosial yang dimonitoring dan dievaluasi	Sulsel	Sulsel	82 kelompok	82 kelompok			



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode							Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
								Jumlah peserta temu usaha KUPS		Jumlah peserta temu usaha KUPS	Sulsel	Sulsel	100 orang	100 orang			
								Jumlah laporan konflik tenurial PS yang difasilitasi penyelesaiannya		Jumlah laporan konflik tenurial PS yang difasilitasi penyelesaiannya	Sulsel	Sulsel	2 laporan	2 laporan			
								Jumlah produk KUPS yang dipromosikan		Jumlah produk KUPS yang dipromosikan	Sulsel	Sulsel	10 produk	10 produk			
							<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	<b>Jumlah DAS yang direhabilitasi</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	<b>Jumlah DAS yang direhabilitasi</b>	Sulsel	Sulsel	<b>2 DAS</b>	<b>2 DAS</b>	<b>2.425.940.000</b>	<b>2.345.220.000</b>	<b>(80.720.000)</b>
							<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah DAS yang dikelola di Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah DAS yang dikelola di Provinsi Sulawesi Selatan</b>	Sulsel	Sulsel	<b>2 DAS</b>	<b>2 DAS</b>	<b>2.425.940.000</b>	<b>2.345.220.000</b>	<b>(80.720.000)</b>
							Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	Sulsel	Sulsel	2 dokumen	2 dokumen	75.000.000	-	<b>(75.000.000)</b>
							Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Jumlah DAS yang dioptimalisasikan fungsi dan daya dukungnya	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Jumlah DAS yang dioptimalisasikan fungsi dan daya dukungnya	Sulsel	Sulsel	2 DAS	2 DAS		-	



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Penerapan teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS	Jumlah unit dam penahan	Penerapan teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS	Jumlah unit dam penahan	Sulsel	Sulsel	34 unit	34 unit	2.103.815.000	2.345.220.000	<b>241.405.000</b>
							Jumlah unit gully plug		Jumlah unit gully plug	Sulsel	Sulsel	22 unit	22 unit			
							Jumlah unit sumur resapan		Jumlah unit sumur resapan	Sulsel	Sulsel	80 unit	80 unit			
						Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah masyarakat dan pihak terkait yang hadir dan berpartisipasi pada kegiatan penanaman	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah masyarakat dan pihak terkait yang hadir dan berpartisipasi pada kegiatan penanaman	Sulsel	Sulsel	250 orang	250 orang		-	
						Pengembangan Kelembagaan pengelolaan DAS	Jumlah pertemuan rapat yang dilaksanakan	Pengembangan Kelembagaan pengelolaan DAS	Jumlah pertemuan rapat yang dilaksanakan	Sulsel	Sulsel	4 kali	4 kali		-	
						Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	Sulsel	Sulsel	1 tahun	1 tahun	247.125.000	-	<b>(247.125.000)</b>
							Jumlah pertemuan atau rapat yang dilaksanakan		Jumlah pertemuan atau rapat yang dilaksanakan	Sulsel	Sulsel	4 kali	4 kali			



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode							Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
							<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Sulsel	Sulsel	100%	100%	126.867.201.741	113.909.694.309	(12.957.507.432)
								Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik		Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	Sulsel	Sulsel	100%	100%			
								Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)		Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)	Sulsel	Sulsel	100%	100%			
							Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Sulsel	Sulsel	100%	100%	977.986.000	1.357.687.500	379.701.500
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah	Sulsel	Sulsel	2 dokumen	2 dokumen	787.506.000	1.278.617.500	491.111.500
							Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Sulsel	Sulsel	1 dokumen	1 dokumen	95.240.000	-	(95.240.000)



**RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021**

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Sulsel	Sulsel	1 dokumen	1 dokumen		-	
						Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Sulsel	Sulsel	1 dokumen	1 dokumen	95.240.000	79.070.000	<b>(16.170.000)</b>
						Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Sulsel	Sulsel	1 dokumen	1 dokumen		-	
						Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Sulsel	Sulsel	2 dokumen	2 dokumen		-	
						Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Sulsel	Sulsel	2 dokumen	2 dokumen		-	
							Jumlah laporan data dan informasi yang dikumpulkan dan dipublikasikan		Jumlah laporan data dan informasi yang dikumpulkan dan dipublikasikan	Sulsel	Sulsel	2 laporan	2 laporan			





# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Sulsel	Sulsel	100%	100%	112.095.122.984	99.740.180.584	(12.354.942.400)
						Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji, tunjangan dan TPP	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji, tunjangan dan TPP	Sulsel	Sulsel	843 orang	843 orang	111.793.652.984	99.491.310.584	(12.302.342.400)
						Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah aparat SKPD yang dikelola administrasi kepegawaiannya	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah aparat SKPD yang dikelola administrasi kepegawaiannya	Sulsel	Sulsel	843 orang	843 orang		-	
							Jumlah administrasi yang disusun		Jumlah administrasi yang disusun	Sulsel	Sulsel	1 laporan	1 laporan			
						Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	Sulsel	Sulsel	50 dokumen	50 dokumen		-	
						Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah pelaporan pelaksanaan akuntansi SKPD	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah pelaporan pelaksanaan akuntansi SKPD	Sulsel	Sulsel	2 laporan	2 laporan		-	
						Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Sulsel	Sulsel	1 laporan	1 laporan	116.155.000	46.925.000	(69.230.000)



**RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021**

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Sulsel	Sulsel	1 laporan	1 laporan	42.940.000	85.880.000	<b>42.940.000</b>
						Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Jumlah pelaporan keuangan yang tersusun	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Jumlah pelaporan keuangan yang tersusun	Sulsel	Sulsel	18 laporan	18 laporan	142.375.000	116.065.000	<b>(26.310.000)</b>
						Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis yang tersusun	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis yang tersusun	Sulsel	Sulsel	2 laporan	2 laporan		-	
						Kegiatan Administarsi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen laporan barang milik daerah	Kegiatan Administarsi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen laporan barang milik daerah	Sulsel	Sulsel	2 dokumen	2 dokumen		-	
						Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan penilaian barang milik daerah SKPD	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan penilaian barang milik daerah SKPD	Sulsel	Sulsel	1 dokumen	1 dokumen		-	
						Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penyusunan barang milik daerah SKPD	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penyusunan barang milik daerah SKPD	Sulsel	Sulsel	1 dokumen	1 dokumen		-	



**RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021**

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Sulsel	Sulsel	1 dokumen	1 dokumen		-	
						<b>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)</b>	<b>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)</b>	Sulsel	Sulsel	<b>Rp. 1.712.430.000</b>	<b>Rp. 1.712.430.000</b>	-	-	
						Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Sulsel	Sulsel	1 laporan	1 laporan		-	
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kebijakan retribusi daerah yang disebarluaskan	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kebijakan retribusi daerah yang disebarluaskan	Sulsel	Sulsel	1 laporan	1 laporan		-	
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan objek retribusi daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan objek retribusi daerah	Sulsel	Sulsel	1 laporan	1 laporan		-	
						Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan data retribusi daerah	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan data retribusi daerah	Sulsel	Sulsel	1 laporan	1 laporan		-	
						Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Sulsel	Sulsel	1 laporan	1 laporan		-	



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	Sulsel	Sulsel	90	90	317.350.000	78.645.000	(238.705.000)
						Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	Sulsel	Sulsel	809 orang	809 orang		-	
							Jumlah pakaian lapangan yang diadakan		Jumlah pakaian lapangan yang diadakan	Sulsel	Sulsel	319 orang	319 orang			
							Jumlah pakaian korpri yang diadakan		Jumlah pakaian korpri yang diadakan	Sulsel	Sulsel	809 orang	809 orang			
							Jumlah pakaian batik khas daerah yang diadakan		Jumlah pakaian batik khas daerah yang diadakan	Sulsel	Sulsel	809 orang	809 orang			
							Jumlah pakaian olahraga dan perlengkapannya yang diadakan		Jumlah pakaian olahraga dan perlengkapannya yang diadakan	Sulsel	Sulsel	809 orang	809 orang			
						Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diadakan	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diadakan	Sulsel	Sulsel	1 laporan	1 laporan	98.600.000	78.645.000	(19.955.000)



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian	Sulsel	Sulsel	1 laporan	1 laporan		-	
						Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah laporan hasil evaluasi penilaian kinerja pegawai	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah laporan hasil evaluasi penilaian kinerja pegawai	Sulsel	Sulsel	1 laporan	1 laporan		-	
						Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparat SKPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparat SKPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Sulsel	Sulsel	100 orang	100 orang	218.750.000	-	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan Perundang-undangan	Sulsel	Sulsel	100 orang	100 orang		-	
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Sulsel	Sulsel	100%	100%	816.247.000	1.045.207.600	228.960.600
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Sulsel	Sulsel	26 unit	26 unit		-	



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Sulsel	Sulsel	300 unit	300 unit		-	
						Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Sulsel	Sulsel	10 jenis	10 jenis		-	
						Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah logistik yang tersedia	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah logistik yang tersedia	Sulsel	Sulsel	2 jenis	2 jenis	234.576.000	434.164.600	199.588.600
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Sulsel	Sulsel	10 jenis	10 jenis		-	
						Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	Sulsel	Sulsel	1 tahun	1 tahun		-	
						Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	Sulsel	Sulsel	1 tahun	1 tahun	581.671.000	611.043.000	29.372.000
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis SKPD yang tertata	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis SKPD yang tertata	Sulsel	Sulsel	50 arsip	50 arsip		-	
						Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang tersedia	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang tersedia	Sulsel	Sulsel	3 sistem	3 sistem		-	



**RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021**

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sulsel	Sulsel	100%	100%	-	-	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	Sulsel	Sulsel	1 unit	1 unit		-	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan operasional dinas	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan operasional dinas	Sulsel	Sulsel	1 unit	1 unit		-	
						Pengadaan mebel	Jumlah lemari arsip yang tersedia	Pengadaan mebel	Jumlah lemari arsip yang tersedia	Sulsel	Sulsel	60 unit	60 unit		-	
							Jumlah meja kerja pejabat eselon/staf yang tersedia		Jumlah meja kerja pejabat eselon/staf yang tersedia	Sulsel	Sulsel	100 unit	100 unit			
							Jumlah kursi kerja pejabat eselon/staf yang tersedia		Jumlah kursi kerja pejabat eselon/staf yang tersedia	Sulsel	Sulsel	100 unit	100 unit			
						Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Sulsel	Sulsel	1 unit	1 unit		-	



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Sulsel	Sulsel	8 unit	8 unit		-	
						Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Sulsel	Sulsel	8 unit	8 unit		-	
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sulsel	Sulsel	100%	100%	12.318.600.252	10.761.893.320	(1.556.706.932)
						Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	Sulsel	Sulsel	1 tahun	1 tahun		-	
						Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	Sulsel	Sulsel	1 tahun	1 tahun	829.636.248	775.283.080	(54.353.168)
						Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Sulsel	Sulsel	1 tahun	1 tahun		-	





# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga non PNS	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga non PNS	Sulsel	Sulsel	369 orang	369 orang	11.488.964.004	9.986.610.240	(1.502.353.764)
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Sulsel	Sulsel	100%	100%	341.895.505	926.080.305	584.184.800
						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	Sulsel	Sulsel	1 unit	1 unit	4.000.000	84.160.000	80.160.000
							Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan		Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	Sulsel	Sulsel	1 unit	1 unit			
							Jumlah pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan roda 4		Jumlah pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan roda 4	Sulsel	Sulsel	1 unit	1 unit			



# RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Sulsel	Sulsel	43 unit	43 unit	138.000.000	567.024.800	429.024.800
							Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Sulsel	Sulsel	43 unit	43 unit			
							Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4		Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4	Sulsel	Sulsel	39 unit	39 unit			
							Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 2		Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 2	Sulsel	Sulsel	382 unit	382 unit			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	Sulsel	Sulsel	10 unit	10 unit		-	
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Sulsel	Sulsel	5 unit	5 unit		-	



**RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021**

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan
						Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Sulsel	Sulsel	25 unit	25 unit	199.895.505	274.895.505	75.000.000
						Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Sulsel	Sulsel	1 tahun	1 tahun		-	
						Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Sulsel	Sulsel	1 tahun	1 tahun		-	
														<b>155.078.577.591</b>	<b>145.947.468.972</b>	<b>(9.131.108.619)</b>



## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada sasaran kinerja dan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang pada RKPD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021. Rencana kerja tersebut menunjukkan kesesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD perubahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021

- a. Pengendalian pelaksanaan pembangunan kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021.
- b. Penilaian akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021

### **5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah dan target kinerja sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021.

Untuk itu, dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tersebut, dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen penganggaran sesuai dokumen perencanaan agar tercipta konsistensi dokumen
2. Melaksanakan rencana kerja perubahan tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
3. Melakukan pengendalian dan pemantauan rencana kerja secara periodik (triwulan, semester)

### **5.2 Rencana tindak lanjut.**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran perubahan (RKA dan DPA tahun 2021) dengan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021.



Selain itu rencana kerja perubahan 2021 menjadi pedoman dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan.